

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Masalah Penelitian	18
1.2 Tujuan Penelitian.....	19
1.3 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah	19
1.3.1 Ruang Lingkup.....	19
1.3.2 Pembatasan Masalah	20
1.3.3 Penjelasan Istilah.....	20
1.4 Anggapan Dasar dan Teori.....	22
1.4.1 Anggapan Dasar	22
1.4.2 Teori	22
1.4.2.1 Pers atau Media masa.....	22
1.4.2.2 Berita	23
1.4.2.3 Marjinalisasi	24
1.5 Penentuan Sumber Data	27
1.5.1 Sumber Data	27
1.5.2 Data	27
1.6 Metodologi Penelitian.....	27

1.6.1	Metode Penelitian.....	27
1.6.2	Jenis Penelitian.....	27
1.6.3	Pendekatan Penelitian	28
1.7	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	28
1.7.1	Teknik Dokumentasi	28
1.7.2	Teknik Hermeneutik.....	29
1.8	<i>Teknik Analisis Data</i>	29
BAB II PENGOLAHAN DATA		30
2.1	Deskripsi Data.....	30
2.2	Analisis Data	48
2.3	Interpretasi Data	79
BAB III KESIMPULAN		81
BAB IV HAMBATAN DAN SARAN		82
4.1	<i>Hambatan</i>	82
4.2	<i>Saran</i>	82
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		
		87

ABSTRAK

PUTRI Y. 2018, *Skripsi*. Marjinalisasi dalam Berita pada Surat Kabar Harian *Riau Pos*.

Penelitian ini berjudul “Marjinalisasi dalam Berita pada Surat Kabar Harian *Riau Pos*”. Masalah penelitian yaitu: (1) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi penghalusan makna (*eufemisme*) dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018? (2) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi bahasa pengasaran (*disfemisme*) dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018? (3) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi *labelisasi* dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018?(4) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi *stereotype* dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan: (1) Penggunaan Marjinalisasi penghalusan makna (*eufemisme*) dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018. (2) Penggunaan Marjinalisasi bahasa pengasaran (*disfemisme*) dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018. (3) Penggunaan Marjinalisasi *labelisasi* dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018. (4) Penggunaan Marjinalisasi *stereotype* dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018. Teori yang digunakan yaitu marjinalisasi dalam buku Eriyanto tahun 2008. Sumber data pada penelitian ini yaitu berita yang terbit atau dicetak pada surat kabar harian *Riau Pos* 1-31 Mei 2018 dan data pada penelitian yakni berbentuk kata atau frasa atau kalimat yang mengindikasikan marjinalisasi. Data marjinalisasi pada surat kabar harian *Riau Pos* yang berjumlah 31 berita hanya ditemukan 20 data. Metode penelitian ini yaitu metode deskriptif, jenis penelitian yaitu kepustakaan, dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan hermeneutik. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Marjinalisasi jenis *Eufemisme* (penghalusan makna) terdapat lima data berita yang ditemukan dalam surat kabar harian *Riau Pos*; (2) Marjinalisasi jenis *disfemisme* (bahasa pengasaran) terdapat dua belas data berita yang ditemukan dalam surat kabar harian *Riau Pos*; (3) Marjinalisasi *Labelisasi*, terdapat tiga data berita yang ditemukan dalam surat kabar harian *Riau Pos*; (4) Marjinalisasi *Stereotype* terdapat tujuh data berita yang ditemukan dalam surat kabar harian *Riau Pos*.

Kata kunci: Marjinalisasi, Wacana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. berkat rahmat, hidayah dan segala anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Marjinalisasi dalam Berita pada Surat Kabar Harian *Riau Pos*”. Selawat beserta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi Agung Muhammad Saw. sebagai suri tauladan untuk umat Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis secara moril maupun materil yang penulis dapatkan setiap hari dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Alzaber, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
2. Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing pertama sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau;
3. Asnawi, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah mendidik penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian perkuliahan ini;

5. istimewa buat kedua orang tua, ayahanda Yondri Ilyas dan Ibunda Rukiah yang selalu menyayangi, memberikan motivasi dan selalu mendoakan, dan
6. Drs. Elwahyudi Panggabean, M.H. selaku dosen jurnalistik yang telah memberikan ilmu- ilmu jurnalistik, dan
7. sahabat setia, Joko Santoso, Rian Azmul Fauzi, Rafi Rahmad Mahmudan, Afrinaldi dan teman-teman seperjuangan kelas E angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan doanya bagi penulis.

Keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis yang penulis miliki, maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Pekanbaru, Mei 2018

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan alat ataupun media dalam berkomunikasi. Berkomunikasi merupakan Proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ke individu lainnya maupun suatu individu ke kelompok individu lainnya. Baik komunikasi secara lisan maupun tertulis dan apapun profesi dari individu tersebut, terutama profesi jurnalis atau wartawan.

Seorang jurnalis menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan atau memberitakan informasi yang diperolehnya di lapangan kepada khalayak pembaca. Tentu saja informasi yang akan diberitakan tersebut adalah informasi yang diperoleh berdasarkan fakta, data, sumber, dan bukti yang aktual dan akurat. Apabila seorang jurnalis memberitakan tanpa dasar yang jelas dan akurat, maka dapat disimpulkan jurnalis tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan dan disepakati.

Dalam Kode Etik AJI yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 12 April 2008, terdapat 18 poin Kode Etik yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seorang jurnalis. Terutama pada poin 10 yakni "Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar sosial lainnya". Dengan kata lain, dalam menginformasikan suatu berita seorang jurnalis harus bersikap netral, tidak memihak, menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan data yang terbukti

kebenarannya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Bahkan hal tersebut juga tercantum dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pada poin ke 3, "Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti informasi, serta tidak melakukan plagiat." Akan tetapi, kenyataan yang ditemukan di lapangan berbeda terutama pada media surat kabar di Provinsi Riau.

Masih ditemukan media surat kabar di Provinsi Riau yakni surat kabar harian *Riau Pos* yang menyajikan berita memarjinalkan pelaku pemberitaan. Jurnalis cenderung tidak netral dalam menulis berita. Sehingga mengakibatkan ketidakbenaran penggambaran, kesalahan penggambaran terhadap seseorang, suatu kelompok, suatu pendapat, sebuah gagasan yang tidak ditampilkan sebagaimana mestinya atau apa adanya tetapi digambarkan secara buruk yang dikenal dengan istilah misrepresentasi. Akibat dari misrepresentasi yang dilakukan oleh jurnalis, masyarakat sebagai khalayak pembaca menjadi bingung sehingga terjadi kesalahan dalam memaknai sebuah berita. Sebagian pembaca hanya terfokus membaca materi-materi yang ada di dalam teks berita tanpa memahami lebih jauh maksud atau makna yang tersembunyi di dalam berita tersebut dan dengan mudah menerima informasi tersebut tanpa menguji kebenarannya. Untuk kebenaran yang tersembunyi di balik teks-teks berita tersebut, perlu dilakukan analisis wacana kritis.

Analisis wacana kritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mencoba mengungkapkan strategi misrepresentasi yang digunakan oleh seorang jurnalis dalam menyampaikan pemberitaan di media surat kabar. Bagaimana

upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari seseorang jurnalis yang menulis teks berita. Misalnya, teks berita tentang Terorisme yang menyerang Mapolda Riau pada pagi hari sedang hangat diberitakan. Beberapa orang yang terduga kawan terorisme menyerang Mapolda Riau yang pada saat itu akan berlangsung acara pemusnahan barang bukti narkoba, sehingga ramai wartawan yang hadir.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah teks berita yang diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos*. Peneliti menggunakan teori misrepresentasi yang dikemukakan oleh Eriyanto. Melalui teori ini memungkinkan khalayak pembaca mengetahui bagaimana suatu peristiwa, kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya di dalam wacana pemberitaan, sehingga yang terlihat hanya keburukan salah satu pihak saja dan menutupi alasan satu pihak melakukan suatu tindakan. Keadaan demikian dapat muncul dalam teks media, karena adanya pihak yang sengaja dihilangkan (eksklusi) dan dilibatkan (inklusi) dalam konstruksi definisi realita oleh wartawan sehingga khalayak pembaca memaknai seseorang atau sekelompok orang secara buruk.

Marjinalisasi ialah analisis wacana pada teks media yang merupakan suatu penggambaran yang buruk kepada suatu pihak/kelompok lain. Marjinalisasi ini biasanya banyak digunakan oleh media massa seperti berita-berita yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial. Hampir setiap ada kejadian bisa dijadikan sebuah berita, dengan syarat berita itu menarik pihak pembaca, dan sesuai dengan fakta dan pada sebuah berita pasti terdapat teknik marjinalisasi.

Menurut Aris Badara (2012: 38) “Van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti proses pemarginalan seseorang

atau kelompok dalam suatu wacana”. Kenyataan bahwa kelompok yang dominan memegang kendali, sementara kelompok lain buruk. Pada konteks tersebut ada hubungan antara wacana dan kekuasaan yang ada pada media atau saluran yang digunakan dalam berkomunikasi. Menurut Eriyanto (2008:124) “Dalam marjinalisasi terjadi penggambaran buruk kepada pihak/kelompok lain”. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap lebih jauh motif dan misi yang tersembunyi di balik wacana media.

Penggunaan marjinalisasi bisa melihat motif dari media yang memberi informasi kepada masyarakat yang dapat dilihat secara terus-menerus sebagai kelompok yang menjadi objek pemaknaan yang posisinya lebih dominan atau cenderung lebih rendah, melalui teori dari Eriyanto, yang melihat ada beberapa pemakaian dalam praktiknya pemakaian bahasa dalam pamarjinalan dapat dilihat saat proses tersebut berlangsung. Pertama, penghalusan makna (*eufemisme*) paling banyak dipakai pada media massa khususnya dalam bidang budaya, terutama untuk menjaga kesopanan dan norma-norma. Eufemisme banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama untuk rakyat bawah, seperti contoh dalam pemindahan pedagang di pasar kebunmen sering kali dikatakan dengan “relokasi”. Dalam kenyataannya memang terjadi pemindahan lokasi, tetapi yang terjadi bukan lokasi seperti sebelumnya di tengah kota, lokasi yang dimaksudkan dalam “relokasi” itu adalah lokasi yang jauh di kota dan jauh dari konsumen.

Kedua, pemakaian bahasa pengasaran (*disfemisme*). Kalau *eufemisme* mengakibatkan realitas menjadi halus, *disfemisme* sebaliknya dapat

mengakibatkan realitas menjadi kasar, biasanya dipakai untuk menyebut tindakan yang dilakukan masyarakat bawah. Sebut saja misalnya, temuan KIPPAS atas liputan pemberitaan sengketa tanah, di mana tindakan petani disebut sebagai “pencaplokan” dan “penyerobotan”. Pemakaian kata mengeraskan dan membuat realitas perilaku petani itu menjadi kasar. Dengan menyebutkan tindakan petani sebagai pencaplokan, tergambar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sah, ilegal, sehingga tindakan itu termasuk ke dalam tindakan anarkis. Ketiga, *labelisasi*. *Labeling* merupakan perangkat bahasa yang digunakan oleh mereka yang beradad di kelas atas untuk menundukkan lawan-lawan. Apabila inofensif digunakan sebagai istilah pengganti yang tidak menarik untuk *eufesisme*, *labeling* adalah pemakaian kata-kata yang *ofensif* kepada individu, kelompok, atau kegiatan. Dalam berita mengenai petani banyak sekali dipakai dan diproduksi oleh labeling ini. Mengutip hasil penelitian KIPPAS, penyebutan petani sebagai “penggarap liar”, “penjarah produksi”, atau “penyerbot lahan” adalah sekian contoh dari pemakaian label. Pemakaian label ini bukan hanya membuat posisi kelompok atau kegiatan menjadi buruk, tetapi juga mempunyai kesempatan bagi mereka yang memproduksinya untuk melakukan kegiatan tertentu karena para petani tersebut “penggarap liar” maka wajar seharusnya mereka ditindak.

Keempat, *stereotype*. *Stereotype* adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (tetapi umunya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Di sini, *stereotype* adalah praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, kontasi yang negatif dan bersifat subyektif. Biasanya praktik *stereotype* ini wanita

karena pada dasarnya Wanita distereotipekan sebagai sesosok yang tidak mandiri, butuh bantuan dan terlalu mementingkan perasaan. Sebaliknya laki-laki distereotipekan sebagai mandiri, tabah, dan rasional. Contoh lainnya bentuk-bentuk penindasan ganda yang terdapat dalam novel *Mirah dari Banda* berdasarkan perspektif feminisme poskolonial novel mewacanakan kedudukan inferior perempuan akibat dominasi sistem kolonialisme Belanda dan Jepang serta dominasi patriarki baik lelaki kolonial maupun pribumi. Melalui dua bentuk penindasan demikian, perempuan pribumi menderita dan berada di level terendah dalam situasi kolonial. Dalam hal ini *stereotype* ini merupakan praktik di mana kelompok tertentu digambarkan secara buruk oleh kelompok lain.

Apabila bahasa yang digunakan pada sebuah media seringkali memberikan informasi kepada masyarakat dengan penggunaan bahasa juga berbeda-beda tergantung pada situasi, yaitu apakah situasi itu publik atau pribadi, formal atau informal, siapa yang diajak bicara, dan siapa yang mungkin ikut mendengarkan kata-kata itu. Satu hal yang tak terpisahkan dari pilihan-pilihan yang kita buat dalam penggunaan bahasa adalah dimensi kekuasaan. Berdasarkan media atau saluran yang digunakan dalam berkomunikasi, wacana dibedakan menjadi wacana tulis dan wacana lisan. Wacana yang merupakan bahan bacaan termasuk wacana tulis. Wacana tulis berupa rangkaian kalimat yang benar-benar menggunakan ragam bahasa tulis. Tarigan (2014: 52) menyatakan “wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis, melalui media tulis. Untuk menerima, memahami, atau menikmatinya maka para penerima harus membacanya”.

Wacana pada bahasa dan menghubungkannya dengan ideologi dalam taraf yang umum menunjukkan bagaimana suatu kelompok berusaha memenangkan dukungan publik, dan bagaimana kelompok lain berusaha dimarginalkan lewat pemakaian bahasa dan struktur gramatika tertentu. Penggambaran yang tampil bisa jadi adalah penggambaran yang buruk dan cenderung memarginalkan seseorang atau kelompok tertentu, dengan kata, kalimat, aksentuasi, dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan dalam pemberitaan kepada khalayak ramai.

Media massa pada umumnya memberikan informasi yang berupa berita. Menurut Barus (2010:26) “Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum”. Namun di sisi lain janganlah kita memandang media sebagai sebuah pihak yang berkuasa penuh dan masyarakat adalah pihak yang tidak berdaya dalam genggamannya, seringkali kategori sosial menjadi pemicu kepada sebuah kelompok tertentu dimana kelompok lain lebih kuat posisinya daripada kelompok tertentu tersebut.

Menurut Eriyanto (2008: 34) “Berita adalah *mirror of reality*, sehingga ia harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. “ Analisis wacana kritis melihat wacana—pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial”. Wacana dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui nama perbedaan itu direpresentasikan dalam

posisi sosial yang ditampilkan. Melalui wacana sebagai contoh, keadaan yang rasis, seksis, atau ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu kewajaran/ alamiah.

Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan (Eriyanto 2008: 11). Berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa di samping *views* (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers. Barus (2010: 21) menyatakan bahwa dalam praktik jurnalistik, berita menduduki posisi utama. Hampir seluruh isi kabar adalah berita. Jurnalisme radio, televisi, dan internet, berita merupakan pesan yang disampaikan oleh pihak media kepada publik.

Surat kabar merupakan sarana komunikasi melalui media massa. Media massa berperan sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara serentak diantara khalayak yang sedang menggunakan media tersebut. Fungsi dari media massa itu sendiri adalah sebagai pengantar dan penyebar berbagai macam pengetahuan, pesan dalam media disebut berita. Berita yang ditulis oleh wartawan harus berdasarkan fakta dan tidak boleh beropini. Tulis tersebut harus mengandung makna informatif, persuasif, singkat, jelas, serta dapat dipahami secara umum oleh pembaca. Sebenarnya, menulis berita adalah menulis fakta-fakta (Panggabean, 2014:118).

Para pembaca terkadang merasa ‘bingung’ oleh banyaknya berita yang dipublikasikan sehingga kita juga kerap bertanya-tanya karena sering kali berita

itu banyak menyudutkan suatu pihak ataupun bahasa yang digunakan terkesan tidak sesuai dengan kenyataan ada bahasa yang digunakan terkesan kasar, ada bahasa yang memerikan julukan kepada suatu pihak dan masih banyak lagi. Ternyata, secara sederhana, berita-berita tersebut terdapat motif- motif politik-ideologis tertentu di balik teks-teks berita tersebut. Surat kabar adalah suatu bentuk komunikasi media massa yang sifatnya tercetak dan permanen (Effendy, 2005:241). Surat kabar dapat dibaca berulang-ulang dan dapat didokumentasikan. Hal inilah yang menjadi kelebihan surat kabar dibandingkan dengan media lainnya.

Fenomena yang terjadi pada saat ini ada beberapa media menggunakan teknik marjinalisasi dalam penulisan beritanya. Salah satu contoh berita yang menggunakan teknik marjinalisasi yakni dalam jurnal yang diakses pada 11 juni 2018 oleh Anggia Pratiwi yakni salah satu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia STKIP YPM Bangko mengenai Misrepresentasi dalam Teks Berita dalam Surat Kabar Radar Sarko dan Merangin Ekspres tahun 2004: Analisis Wacana Kritis. Pada surat kabar Radar Sarko dan Merangin Ekspres, ditemukan 71 data yang menggunakan eufemisme dalam menyampaikan beritanya. Salah satu alasan kenapa eufemisme lebih banyak diterapkan dalam tulisan di media cetak karena eufemisme lebih cocok digunakan untuk menggambarkan tindakan pelaku sosial secara individu/kelompok/lembaga kepada masyarakat ke bawah (Eriyanto, 2006:125). Apalagi, pemberitaan di media cetak maupun elektronik lebih banyak mengetengahkan permasalahan yang

berdampak kepada masyarakat. Berikut contoh kutipan teks berita yang diidentifikasi menggunakan eufemisme dalam penyampaian informasinya.

Salah satu dokter yang tidak ingin disebutkan namanya, secara terang-terangan mengatakan sistem kapitasi yang hendak diterapkan bagi dokter di layanan kesehatan primer (Puskesmas) bisa membuat dokter 'tekor'. Kondisi ini terkait berkurangnya pendapatan dokter meski jumlah pasien meningkat.

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang diterbitkan surat kabar Radar Sarko (RS.4.b) edisi Rabu, 24 September 2014. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori eufemisme. Pada kutipan teks berita dengan judul "Dokter Keluhkan Sistem Kapitasi" yang menjadi pelaku sosial adalah dokter OZ (nama disamarkan) yang mengeluhkan sistem kapitasi sejak pemberlakuan BPJS. Sistem kapitasi tersebut dianggap mempengaruhi metode pembayaran jasa dokter yang telah melaksanakannya dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut mereka, dengan penerapan sistem tersebut membuat mereka tidak mendapat keuntungan dalam melaksanakan tugas mereka. Padahal mereka berharap mendapatkan penambahan hasil pendapat selain gaji yang diterima untuk setiap bulannya.

Bagi masyarakat umum, istilah sistem kapitasi tidak akan dipahami secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan istilah kapitasi. Untuk membantu masyarakat dalam memahami istilah tersebut, jurnalis menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis

menggunakan kata “tekor” yang berarti rugi. Penggunaan kata “tekor” dipilih karena kata tersebut lebih banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan kata “rugi”. Sedangkan kata “rugi” dianggap tidak tepat untuk digunakan karena dianggap bermakna kasar. Menurut jurnalis, jika menggunakan kata “rugi” member konotasi negatif bahwa dokter yang memberi pelayanan kesehatan tidak ikhlas membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Marjinalisasi pada surat kabar sangat menarik untuk diteliti. Salah satunya surat kabar di Riau yang terdapat marjinalisasi pada penulisan beritanya adalah surat kabar harian *Riau Pos*. *Riau Pos* adalah surat kabar harian nasional yang pertama kali berdiri dan diterbitkan sejak tahun 1991. Surat kabar harian *Riau Pos* menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau karena memiliki pengaruh yang besar bagi pembacanya dan juga bagi masyarakatnya karena suatu kejadian yang ada di Riau akan dimuat pemberitaannya disurat kabar tersebut, secara surat kabar ini diterbitkan hampir setiap hari, meskipun banyak menghadapi persaingan media lain *Riau Pos* tetap menjaga dan meningkatkan kualitasnya, serta berhasil mempertahankan keberadaannya sebagai surat kabar daerah yang terus terbit dan tidak absen mengunjungi pembaca setianya. kecuali pada Hari Raya Idul Fitri.

Surat kabar harian *Riau Pos* ini memiliki beberapa rubrik dalam terbitan perharinya, setiap rubrik pasti ada marjinalisasinya, tetapi ada pula beberapa edisi yang tidak terdapat marjinalisasi disetiap rubriknya. Penulis mengambil seluruh rubrik pada surat kabar harian *Riau Pos* ini karena ada beberapa berita yang setiap

rubrik pada bagian judul ada marjinalisasi namun, pada isi berita tidak ditemukan marjinalisasi.

Penelitian yang membahas tentang masalah ini sebenarnya sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Ezi Hendri, tahun 2010, adapun judul Skripsi “Wacana Marjinalisasi Politik Perempuan Dalam Media (Studi Analisis Wacana Marjinalisasi Perempuan dalam Berita Calon Legislatif tahun 2009 di Harian Jawa Pos Periode 1 Maret - 30 April 2009)” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Masalah penelitian yaitu: melihat aspek marjinalisasi terhadap politik perempuan yang diwacanakan oleh media melalui berita, dalam hal ini harian Jawa Pos periode 1 Maret-30 April 2009. Teori yang digunakan Mursito, Scheidel dalam Mulyana, Dance dalam Rakhmat, Nurudin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berita-berita tentang Caleg tahun 2009 yang dimuat di harian Jawa Pos kurun waktu 1 Maret-30 April 2009, terdapat kecenderungan perempuan dimarjinalisasikan dalam ranah politik. Artinya, kehadiran perempuan dalam berita ‘diciptakan’ agar tidak terlibat jauh dalam ruang politik. Hal ini dilihat dari banyaknya berita yang memposisikan perempuan sebagai objek ketimbang subjek. Ketika sebagai objek, perempuan tidak diberikan ruang untuk berpendapat dan berargumen karena wartawan memilih berita dari perpektif laki-laki.

Selanjutnya, marjinalisasi terjadi ketika perempuan ditiadakan (pasivasi) dalam berita. Dalam hal ini strategi yang digunakan berupa penghilangan dan

penyamaran posisi perempuan dalam berita. Terakhir praktek marjinalisasi ketika dalam berita terjadi pengingkaran (negasi) terhadap kehadiran dengan tema-tema perempuan. Akhirnya, menurut hemat penulis berita-berita di harian Jawa Pos memarginalkan posisi perempuan. Melihat posisi perempuan yang termarginalkan, penulis memberikan saran agar harian Jawa Pos mampu bersifat netral dan seimbang dengan menyuguhkan fakta-fakta yang sesuai dengan fakta lapangan. Sebagai institusi pers, harian Jawa Pos diharapkan mengikutsertakan perempuan dalam sistem keredaksian, khususnya desk politik. Kehadiran perempuan sebagai jurnalis, mampu memberi nuansa baru dalam peliputan berita-berita terkait perempuan dan segala aktivitasnya. Persamaan dan perbedaan, persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang marjinalisasi dalam berita sama-sama menggunakan metode deskriptif. Sedangkan perbedaannya dari segi media beritanya. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian lanjutan.

Penelitian kedua Endang Setiowati, 2011, dalam jurnal HUMANIORA, Vol. 2 No. 2, 2011 dengan judul “Marjinalisasi Perempuan Pertama Melalui Lagu: Suatu Analisis Wacana Kritis Terhadap Lagu “Jadikan Aku Yang Kedua” di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Program Studi Marketing Communication Universitas BINUS. Masalah yang diteliti adalah Bagaimana terjadinya penciptaan lirik/lagu, dan bagaimana sampai sebuah lagu dikonsumsi khalayak, merupakan sebuah proses. Teori yang digunakan *Michael Foucault*, Eriyanto.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana kritis dengan teknik analisis menggunakan model Norman Fairclough. Hasil penelitian ini menyimpulkan pada dasarnya perempuan tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan cinta dua insan, tapi karena ideologinya yang merupakan cerminan sifat egonya untuk menjadikan “Diri” yang bebas, menjadi subyek dan bukannya obyek, perempuan mau melakukan apa saja asalkan bisa bahagia menurut versi masing-masing. Sementara pada dasarnya lelaki menyetujui poligami atau menganggap lazim adanya fenomena orang ketiga dalam pernikahan atau hubungan cinta dua insan. Namun jika belum dihadapkan pada fenomena ini lelaki cenderung untuk menolak. Sebaliknya jika sudah dihadapkan pada fenomena ini, lelaki cenderung menerima dan menjalaninya. Lagu *Jadikan Aku yang Kedua* merupakan wacana memarjinalkan perempuan yang menempati posisi sebagai perempuan yang pertama, sementara bagi perempuan kedua lagu ini justru memberdayakan perempuan. Sebab pencipta lagu mempunyai kekuasaan untuk membentuk ideologi konsumen (pendengar) lagu tersebut ke arah ideologi patriarkinya. Pencipta lagu ingin menggunakan kuasanya untuk menganjurkan para perempuan agar tidak gusar untuk menjadi “yang kedua”. Dengan menguatnya ideologi *Post-Feminism* dalam masyarakat, tentu saja ideologi patriarki juga akan semakin menguat sebab para lelaki akan semakin diuntungkan, karena mereka bisa dengan leluasa dan dilegalkan untuk memiliki perempuan lebih dari satu orang. Persamaan dan perbedaan, persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang marjinalisasi.

Sedangkan perbedaannya dari segi metode yang digunakan dan objeknya. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian lanjutan.

Penelitian ketiga Tri Setia Ayuningsih, 2014, adapun judul Skripsi “Menguak Proses Marjinalisasi di balik Kebijakan Normalisasi Sungai Gendol: Studi Kasus di Masyarakat Dusun Ngungan, Sleman Yogyakarta” di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Masalah yang diteliti adalah bagaimana proses marginalisasi masyarakat desa sebagai akibat dari kebijakan normalisasi Sungai Gendol. Teori yang digunakan Hillary Silver.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan Proses marjinalisasi yang paling dominan ditemukan adalah diskriminasi dalam dimensi politik dan ekonomi. Diskriminasi merujuk pada batasan yang kuat antara kelompok *excluders* dan *excluded*, dengan adanya dominasi kelompok yang satu terhadap lainnya. Pada kenyataannya, pengusaha penambang lebih diuntungkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Pemda Sleman membuat kebijakan yang bersifat inklusif dan berakar pada aspirasi masyarakat lokal. Sebaliknya, Pemda Sleman yang bertindak permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha penambang menunjukkan komitmen yang rendah untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Persamaan dan perbedaan, persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Marjinalisasi. Sedangkan

perbedaannya dari segi Metode yang digunakan dan objeknya. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian lanjutan.

Penelitian keempat Shella Yan Prantya, 2017, dalam jurnal BAPALA Vol. 1 No. 1, 2017 dengan judul “Analisis Wacana Kritis Sara Mills Marjinalisasi Perempuan Dalam Berita Pelecehan Seksual Surat Kabar Harian *Memorandum* Edisi September 2013 dan Juli 2015; Analisis Wacana Kritis Sara Mills” di Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Masalah yang diteliti adalah mengenai marjinalisasi perempuan sebagai subjek, objek, dan pembaca berita pelecehan seksual dalam surat kabar harian *Memorandum* edisi September 2013 dan Juli 2015 yang dianalisis menggunakan teori analisis wacana kritis Sara Mills. Teori yang digunakan Sara Mills.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa marjinalisasi perempuan sebagai subjek berita pelecehan seksual dalam surat kabar harian *Memorandum* ditemukan bahwa pada data-data yang dianalisis subjek selalu ditampilkan sebagai pencerita. Dalam teks subjek dapat menampilkan dirinya sesuai dengan kepentingan dan ada yang bisa ditampilkan sebagai pencerita. Akibatnya, pihak tersebut sering ditampilkan secara baik. Marjinalisasi perempuan sebagai objek berita pelecehan seksual dalam surat kabar harian *Memorandum* ditemukan bahwa pada data yang dianalisis, objek selalu ditampilkan menurut perspektif pencerita. Objek tidak dapat menampilkan dirinya dalam teks. Akibatnya, pihak tersebut sering ditampilkan secara buruk. Objek yang dihadirkan umumnya dinilai tidak

memiliki kisah untuk memposisikan dirinya secara baik sehingga objek ditampilkan dengan posisi yang merugikan dirinya. Marjinalisasi perempuan oleh pembaca berita pelecehan seksual dalam surat kabar harian *Memorandum* ditemukan bahwa pembaca dalam setiap penceritaan diposisikan menjadi bagian yang integral dalam teks dengan pemakaian kata ganti. Persamaan dan perbedaan, persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang marjinalisasi, sama-sama menggunakan metode deskriptif. Sedangkan perbedaannya dari segi objeknya. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian lanjutan.

Penelitian kelima Fatma AR. Umar tahun 2017 dalam jurnal LITERA Volume 16, Nomor 1, April 2017, dengan judul “Faktor Dan Strategi Pencegahan Pemarjinalan Bahasa Suwawa Di Provinsi Gorontalo” di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Masalah yang ditelitinya adalah medeskripsikan faktor dan strategi pencegahan pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo. Teori yang digunakan wantogia dan wantogia, kaluku dalam Daulima, Daulima, Prasaja dalam Wahyudi Ed, Mahsun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan (1) termarjinal tidaknya bahasa Suwawa sangat ditentukan oleh (i) peran serta keluarga (orang tua) dalam mengintensifkan penggunaan bahasa Suwawa (ii) keseriusan Pemerintah Daerah dan Kemnedikas melalui Kantor Bahasa dalam hal memfasilitasi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah (Suwawa), (2) faktor penyebab pemarjinaan bahasa Suwawa lebih

banyak berasal dari generasi muda dan guru, baik dari faktor konseptual, operasional, sikap, maupun sikap bahasa. Untuk mencegah penyebab pemarjinalan bahasa Suwawa tersebut dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi yang dimaksud, baik melalui pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Persamaan dan perbedaan, persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemarjinalan, sama-sama menggunakan metode deskriptif. Sedangkan perbedaannya dari segi objeknya. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian lanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Manfaat teoretis pada penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan pengetahuan tentang permajinalan dan menjadi acuan penelitian di bidang bahasa dan sastra Indonesia pada bidang jurnalistik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Riau (UIR), sedangkan manfaat secara praktis berguna sebagai referensi selanjutnya yang ingin meneliti tentang marjinalisasi.

1.1.2 Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, marjinalisasi terbagi atas empat yakni, 1) penghalusan makna (*eufemisme*), 2) bahasa pengasaran (*disfemisme*), 3) *labelisasi*, 4) *stereotipe*, maka dapatlah di formulasikan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi penghalusan makna (*eufemisme*) pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018?
- 2) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi bahasa pengasaran (*disfemisme*) pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018?
- 3) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi *labelisasi* pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018?
- 4) Bagaimanakah Penggunaan Marjinalisasi *stereotipe* pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan:

- 1) Penggunaan Marjinalisasi penghalusan makna (*eufemisme*) pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018.
- 2) Penggunaan Marjinalisasi bahasa pengasaran (*disfemisme*) pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018.
- 3) Penggunaan Marjinalisasi *labelisasi* pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018.
- 4) Penggunaan Marjinalisasi *stereotipe* pada berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* Tahun 2018.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1. Ruang Lingkup

Penelitian yang berjudul “Marjinalisasi Dalam Berita Pada Surat Kabar Harian *Riau Pos* Tahun 2018” ini termasuk ke dalam ruang lingkup kajian

analisis wacana khususnya pada bagian misrepresentasi yang terdiri dari 4 hal misrepresentasi adalah penggambaran kepada suatu kelompok. Misrepresentasi yang mungkin terjadi dalam pemberitaan: 1) ekskomunikasi (*excommunication*) yakni suatu kelompok dikeluarkan dari pembicaraan publik karena dianggap bukan bagian dari partisipan publik, 2) eksklusi (*exclusion*) yakni suatu kelompok yang dianggap buruk tetapi masih bisa, 3) Marjinalisasi, 4) Delegitimasi dalam teori Eriyanto (2008:120-127).

1.3.2 Pembatasan Masalah

Untuk keperluan spesifikasi ruang lingkup kajian, penulis membatasi penelitian ini pada analisis wacana bagian misrepresentasi kategori marjinalisasi. Marjinalisasi adalah terjadinya penggambaran buruk kepada pihak atau kelompok lain, pamarjinalan tidak terjadi pemilahan antara pihak kita dengan pihak mereka (Eriyanto, 2008:124). Marjinalisasi ada empat jenis, yakni 1) *eufemisme*, 2) *disfemisme*, 3) *labelisasi*, 4) dan *stereotip*.

1.3.3 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami orientasi penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang relevan dengan masalah pokok penelitian ini:

1) Marjinalisasi terjadi penggambaran buruk kepada pihak atau kelompok lain.

Akan tetapi, berbeda dengan eksklusi atau ekskomunikasi, di sini tidak terjadi pemilahan antara pihak kita dengan pihak mereka (Eriyanto, 2008: 124).

2) Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat (Depdiknas, 2008: 528)

- 3) Makna adalah arti (Depdiknas, 2008: 864)
- 4) *Riau Pos* adalah surat kabar harian nasional yang pertama kali berdiri dan diterbitkan sejak tahun 1991.
- 5) Media adalah sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk (Depdiknas, 2008: 892).
- 6) Surat kabar adalah suatu bentuk komunikasi media massa yang sifatnya tercetak dan permanen (Effendy, 2005:241).
- 7) Surat kabar adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita dsb; koran (Depdiknas, 2008: 1361)
- 8) Surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit setiap hari (Depdiknas 2008: 1361)
- 9) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya(Depdiknas 2008:58)
- 10) Wacana adalah kesatuan (semantis) antar bagian di dalam suatu bangun bahasa (Kushartanti, dkk 2005:92).
- 11) Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. (Depdiknas, 2008: 116).
- 12) Penulis adalah orang yang menulis; pengarang (Depdiknas, 2008: 1497)
- 13) Subjek adalah pokok pembicaraan (Depdiknas, 2008: 1345)

1.4 Anggapan Dasar dan Teori

1.4.1 Anggapan Dasar

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan penulis terhadap Surat Kabar Harian *Riau Pos* penulis mengungkapkan anggapan dasar bahwa dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* tahun 2018 terdapat marjinalisasi dan dalam pengimplikasiannya terjadi penggambaran buruk kepada pihak/ kelompok lain.

1.4.2 Teori

Sebagai acuan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh Eriyanto tahun 2008. Teori yang digunakan berhubungan dengan masalah penelitian yaitu Marjinalisasi Dalam Berita Pada Surat Kabar Harian *Riau Pos* Tahun 2018.

1.4.2.1 Pers atau Media Masa

Pers telah menjadi salah satu industri jika dilihat dari organisasi, pengelolaan, produksi, pemasaran, dan sasaran atau khalayak. Media massa telah masuk dalam kelompok perusahaan multi nasional atau industri raksasa dengan sasaran khalayak yang mendunia pula. Media masa misalnya radio, TV, film, dan media *online* berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat (Barus, 2010: 16-17). Dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 1 bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, uara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Barus (2010: 16-18) menyatakan bahwa fungsi pers diketahui selama ini secara garis besar mencakup empat hal, yaitu: (1) fungsi memberi informasi, (2) fungsi mendidik, (3) fungsi memberi hiburan, dan (4) melaksanakan kontrol sosial. Fungsi pers lainnya diungkapkan Kusumaningrat (2007: 27-29) menyatakan bahwa fungsi pers adalah fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi swadaya. Sumadiria (2008: 32-35) menyatakan bahwa fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi koreksi, fungsi rekreasi, dan fungsi mediasi. Berdasarkan fungsi yang dipaparkan di atas, sebuah media tentunya harus memperhatikan kesemuanya itu.

1.4.2.2 Berita

Berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa di samping *views* (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers. Barus (2010: 21) menyatakan bahwa dalam praktik jurnalistik, berita menduduki posisi utama. Hampir seluruh isi kabar adalah berita. Jurnalisme radio, televisi, dan internet, berita merupakan pesan yang disampaikan oleh pihak media kepada publik.

Barus (2010: 26) menyatakan bahwa berita adalah segala laporan mengenai peristiwa kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum. Berita harus berupa fakta tidak boleh tercampur di dalamnya opini dari wartawan. Berita juga harus menarik serta kejadiannya harus faktual dan aktual. Charnely dalam Romli (2009: 5) menyatakan berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi

sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Jadi, suatu pesan atau berita harus sebuah fakta dan juga menarik bagi pembaca sehingga pembaca terpenuhi kebutuhannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Berita tidak hanya satu jenis. Romli (2014:11-12) menyatakan bahwa ada beberapa jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik antara lain: (1) *straight News* adalah berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama (*headline*) merupakan berita jenis ini, (2) *depth news* adalah berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada dibawah suatu permukaan, (3) *Investigation News* adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber, (4) *interpretative news* adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan, (5) *opinion news* merupakan berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi poleksosbuhakam, dan sebagainya. Struktur berita, khususnya berita langsung (*straight news*), pada umumnya mengacu pada sruktur piramid terbalik (*inverted pyramid*), yaitu memulai penulisan berita dengan mengemukakan fakta/data yang dianggap paling penting, kemudian diikuti bagian- bagian yang dianggap agak penting, kurang penting dan sebagainya.

1.4.2.3 Marjinaliasi

Marjinalisasi terjadi penggambaran buruk kepada pihak atau kelompok lain. Akan tetapi, berbeda dengan eksklusi atau ekskomunikasi, di sini tidak terjadi pemilahan antara pihak kita dengan pihak mereka (Eriyanto, 2008: 124).

Ada beberapa praktik pemakaian bahasa sebagai strategi wacana dari marjinalisasi ini yaitu: 1) *eufemisme* (penghalusan makna, 2) *Disfemisme* (bahasa pengasaran, 3) Labelisasi, 4) Stereotipe.

1.4.2.3.1 Eufemisme (penghalusan makna)

Kata eufemisme pertama kali dipakai dalam bidang budaya, terutama untuk menjaga kesopanan dan norma-norma. Tidak mengherankan jika eufemisme pertama kali banyak dipakai untuk mengganti jenis kelamin. Pemakaian bahasa untuk alat vital tertentu baik-baik saja, dan tidak mengganggu yang menjadi masalah adalah ketika penghalusan ini dipakai untuk menandai dan menamai suatu realitas. Masalah terjadi ketika realitas itu adalah realitas buruk yang memalukan seperti kemiskinan, pembunuhan, korupsi, dan kelaparan. Eufemisme banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama menipu rakyat bawah. Pemindahan pedagang di pasar Kebumen sering dikatakan dengan ‘relokasi’. Dalam kenyataannya memang terjadi pemindahan lokasi, tetapi yang terjadi bukan lokasi sebelumnya di tengah kota. Lokasi yang dimaksud dalam ‘relokasi’ itu adalah lokasi yang jauh ditengah kota yang jauh dari konsumen. (Eriyanto, 2008:125).

1.4.2.3.2 Disfemisme (bahasa pengasaran)

kalau eufemisme dapat mengakibatkan realitas menjadi halus, disfemisme sebaliknya dapat mengakibatkan realitas menjadi kasar. Kalau eufemisme banyak dipakai untuk menyebut tindakan yang dilakukan kelompok dominan, disfemisme umumnya banyak dipakai untuk menyebutkan tindakan yang dilakukan

masyarakat bawah. Misalnya KIPPAS atas liputan pemberitaan sengketa tanah, di mana tindakan petani disebut sebagai ‘pencaplokan’ dan ‘penyerobotan’. Pemakaian kata-kata itu mengeraskan dan membuat realitas perilaku petani itu menjadi kasar. Dengan menyebut tindakan petani sebagai pencaplokan, tergambar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sah, ilegal, sehingga tindakan itu termasuk ke dalam tindakan anarkis. (Eriyanto, 2008: 125)

1.4.2.3.3 Labelisasi

Labeling merupakan perangkat bahasa yang digunakan oleh mereka yang berada di kelas atas untuk menundukkan lawan-lawan. Pemakaian label ini bukan hanya membuat posisi kelompok atau kegiatan menjadi buruk, tetapi juga mempunyai kesempatan bagi mereka yang memproduksinya untuk melakukan tindakan tertentu. Karena para petani tersebut ‘penggarap liar’ maka wajar dan seharusnya jika mereka ditindak (Eriyanto, 2008: 126).

1.4.2.3.4 Stereotipe

Stereotipe adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (tetapi umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Di sini, stereotipe adalah praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif. Banyak sekali praktik stereotipe ini. Wanita, misalnya, distereotipekan sebagai sosok yang tidak mandiri, butuh bantuan, dan terlalu mementingkan perasaan. Sebaliknya laki-laki distereotipekan sebagai mandiri, tabah, dan rasional. Stereotipe itu pada akhirnya merupakan praktik di mana kelompok tertentu digambarkan secara buruk oleh kelompok lain. (Eriyanto, 2008: 126)

1.5 Penentuan Sumber Data

1.5.1 Sumber Data

Arikunto (2010: 90) menyatakan “Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.” Sumber data pada penelitian ini adalah berita yang terbit atau dicetak pada surat kabar harian *riau pos* 1-31 Mei 2018 yang berjumlah 31 edisi.

1.5.2 Data

Data pada penelitian yakni berbentuk kata atau frasa atau kalimat yang mengindikasikan marjinalisasi. Data marjinalisasi yang terdapat dalam surat kabar harian *Riau Pos* yang berjumlah 20 berita. *Metodologi Penelitian*

1.6.1 Metode penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Narbuko (2012:44) menyatakan “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”. Jadi, penulis ingin mendeskripsikan data mengenai pamarjinalan penulis terhadap implikasi makna berita pada Surat Kabar Harian *Riau Pos* Tahun 2018.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014:68)

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang “*Marjinalisasi* Dalam Berita Pada Surat Kabar Harian *Riau Pos* Tahun 2018” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2014:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Moleong (2007: 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.7.1 Teknik Dokumentasi

Arikunto (2013: 274) menyatakan “Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”. Teknik ini penulis gunakan untuk mendokumentasikan dan mengambil berita dengan cara mengumpulkan semua berita yang berkaitan dengan *Marjinalisasi* dalam berita untuk dikelompokkan menjadi data penelitian.

1.7.2 Teknik Hermeneutik

Hamidy (2003:24) menyatakan “Hermeneutik yaitu teknik baca, catat dan simpulkan”. Teknik baca penulis gunakan untuk membaca berita yang sudah diterbitkan atau dicetak disurat kabar harian *Riau Pos* sebagai langkah awal mengidentifikasi data penelitian. Teknik baca penulis gunakan untuk membaca data penelitian. Teknik catat penulis gunakan untuk mencatat dan menandai data-data berita yang termasuk ke dalam pamarjinalan atau mengidentifikasi data-data sesuai teori penelitian. Teknik simpulkan penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang sudah dibaca dan dicatat tersebut. Data yang dibaca, dicatat dan simpulkan yaitu data yang berupa berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* tahun 2018.

1.8 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut ini:

- 1) data yang sudah terkumpul penulis identifikasi satu persatu berdasarkan masalah penelitian ;
- 2) data yang sudah identifikasi dikelompokkan ke dalam sebuah bentuk deskripsi data;
- 3) data yang sudah dikelompokkan penulis analisis satu persatu berdasarkan teori pamarjinalan yaitu teori Eriyanto tahun 2008;
- 4) setelah data dianalisis penulis melakukan interpretasi data;
- 5) setelah semua berita dianalisis dan diinterpretasikan, penulis mengambil kesimpulan sesuai hasil dari analisis data

BAB II PENGOLAHAN DATA

2.1 Deskripsi Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang akurat, berikut penulis mendeskripsikan data tentang Marjinalisasi dalam Berita Pada Surat Kabar Harian *Riau Pos* Edisi Mei 2018. Ada beberapa praktik pemakaian bahasa sebagai strategi wacana dari marjinalisasi ini yaitu: 1. *Eufemisme* (penghalusan makna), 2. *Disfemisme* (pengasaran bahasa), 3. *Labelisasi*, 4. *Stereotipe*. Berikut ini deskripsi data Marjinalisasi Dalam berita pada surat kabar harian Riau Pos edisi Mei 2018

TABEL 1 DESKRIPSI DATA MARJINALISASI DALAM BERITA PADA SURAT KABAR HARIAN *RIAU POS* EDISI MEI 2018.

No	Keterangan publikasi	Kode Data	Judul berita	Data	Keterangan
1	1 Mei 2018	01	Kinerja terburuk Se- Riau	<p>Telukkuantan (RP) – dari hasil laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) Pemkab kuansing yang disampaikan setiap tahunnya kepada pemerintah pusat melalui kementarian dalam negeri (Kemendagri), menunjukkan kinerja pemkab kuansing tahun 2016 lalu, berada diperingkat 310 dari 397 kabupaten/kota se-Indonesia.</p> <p><i>Sedangkan untuk Riau, peringkat terakhir dari 12 kabupaten/kota. Hal tersebut dibenarkan sekretaris daerah kabupaten kuansing Dr H Dianto mampanini SE MT saat dihubungi</i></p>	1 mei 2018 lampiran 1 halaman 88

SAMBUNGAN TABEL I

			<p>wartawan akhir pekan lalu. Menurut dianto, penilaian peringkat kinerja tersebut lewat keputusan Mendagri. “Iya benar. Tahun 2016 lalu kita peringkat 310 dari 397 kabupaten/kota se-Indonesia. Kalau untuk Riau, kita peringkat terakhir. Dibandingkan tahun 2015, peringkat kita memang turun drastis dari 233 se-Indonesia. Dianto menjelaskan bahwa LPPD merupakan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif pemerintah pusat dalam mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda. Terutama dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. “Penurunan kinerja pemerintah itu disebabkan banyak indikator. Diantaranya, lambatnya pengesahan APBD, transparansi anggaran, kedisiplinan ASN dan masih banyak lagi. Artinya, penilaian itu berdasarkan kondisi di lapangan. Termasuk soal pengisian data yang diminta pemerintah pusat,” kata dianto.</p>	
--	--	--	---	--

SAMBUNGAN TABEL I

2	2 Mei 2018	02	Dewan Segera Panggil PTPN V	<p>PEKANBARU (RP)- Anggota Komisi B DPRD Riau Sugianto mengaku geram dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V alasannya, masih ada buruh harian lepas (BHL) digaji Rp 31 ribu per hari. Hal itu menurutnya sangat <i>tidak manusiawi</i>. Serta bertentangan dengan aturan yang ada. Masalah itu diketahui setelah Sugianto datang ke Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Di mana daerah tersebut merupakan areal pekerja PTPN V. “ saya sudah kesana. Kamarin saya reses ke Lubuk Dalam. Bertemu BHL dan pegawai PTPN V,” ujar Sugianto, Selasa (1/5) siang.</p> <p>Lebih lanjut dikatakan dia, dari aduan buruh, pihak perusahaan mengaku diupah Rp 80ribu ketika tim sertifikat <i>indonesian sustainable palm oil</i> (ISPO) datang. “ <i>anehnya lagi, saat memberikan upah ke buruh, pihak perusahaan tidak memberikan kwitansi. Ini saya heran ada permainan apa di sana,</i>” ungkapnya.</p>	2 Mei 2018 lampiran 2 halaman 89
3	2 Mei 2018		Polisi Diminta Tangkap “Pemain” Sembako	PEKANBARU(RP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau <i>curiga ada permainan</i> di tingkat distribusi sembako. Pasalnya, sejumlah instansi yang telah	2 Mei 2018 lampiran 3 halaman 90

SAMBUNGAN TABEL I

					<p>dimintai keterangan stok pangan di Provinsi Riau aman.</p> <p>Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi. Ia meminta jika kedapatan, mafia sembako agar langsung ditangkap. “Ya, kami minta kepada aparat penegak hukum supaya menangkap <i>pemain sembako</i>. Jangan sampai <i>rakyat semakin menjerit</i> demi keuntungan pribadi,” tegasnya.</p>	
4	4 2018	Mei	04	<p>Diusut Proyek Drainase Rp 11,4 M</p>	<p>KEJAKSAAN Negeri (Kejari) pekanbaru <i>mencium</i> adanya dugaan korupsi dalam pembangunan drainase jalan soekarno hatta, pekanbaru pada 2016. Dugaan korupsi ini sedang diusut.</p> <p>Pengerjaan proyek dilakukan dari simpang jalan Riau hingga Mal Ska Pekanbaru. Diduga, pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.</p> <p>Saat itu, Komisi yang membidangi infrastruktur kecewa dengan sejumlah proyek itu. <i>pasalnya proyek tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan</i>. Akibatnya, hasilnya tampak <i>amburadul</i> dan tidak sesuai dengan nilai proyek yang mencapai</p>	4 Mei 2018 lampiran 4 halaman 91

SAMBUNGAN TABEL I

5	5 Mei 2018	05	Waspada Seynov Ajukan PK	Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar.	5 Mei 2018 lampiran 5 halaman 92
6	5 Mei 2018	06	Dewan Minta Kasus PT Duta Palma	Ia berharap BLH dapat bekerja dengan jujur. Bahkan ia mengingatkan BLH agar tidak bermain mata dengan perusahaan. Karena masalah tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jika dalam kenyataan salah, maka BLH harus sampaikan sejujurnya. “Jangan sampai ada yang <i>bermain mata</i> . Coba saja kalau berani. Saya usut sampai tuntas,” tegas politisi Hanura itu	5 Mei 2018 lampiran 6 halaman 93
7	6 Mei 2018	07	Diduga larikan mobil, oknum polisi dilaporkan	<i>Diduga telah menggelapkan mobil</i> , seorang oknum polisi dilaporkan ke Propam Polda. Korban yang bernama Syamsuardi (45) melaporkan oknum tersebut karena telah sebulan mobilnya tak dikembalikan. <i>Mobil yang diduga digelapkan itu, yakni satu unit toyota Avanza BM</i>	6 Mei 2018 lampiran 7 halaman 94

SAMBUNGAN TABEL I

				<p>1427 IN warna merah. Mobil ini adalah milik Syamsuardi, warga jalan Cipta Karya, Panam. Korban sendiri melaporkan ini ke PropamPolda Riau pada Rabu (2/5). Yang dilaporkan itu oknum polisi inisial SR berpangkat Kopol, dan bertugas di Polda Riau. Mobil ini milik korban, dipinjam oleh oknum polisi sejak 7 April 2018. Namun, hingga saat ini, mobil itu belum dikembalikan. “Dia (oknum, red) sudah saya laporkan ke Propam Polda Riau untuk pertanggungjawabannya atas mobil yang dipinjamkan,” ungkap Syamsuardi, kemarin.</p>	
8	7 Mei 2018	08	Daerah diduga Sering beri Suap	<p>SUAP Rp500 juta <i>mengegolkan</i> usulan pembangunan melalui dana perimbangan keuangan daerah tidak lepas dari peran Yaya Purnomo. Yakni seorang Kepala Seksi (Kasi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman ditjen perimbangan kementerian keuangan. KPK pun mendalami keterlibatan pejabat yang diduga sering <i>mendapat hadiah</i> dari daerah itu. Bahkan, uang yang disita dari apartemen Yaya di wilayah Bekasi lebih besar</p>	7 Mei 2018 lampiran 7 halaman 95

SAMBUNGAN TABEL I

				<p>dari uang suap yang diterima Amin Satono, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat dan Eka Kamaludin, selaku perantara. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (4/5) lalu, KPK berhasil mengamankan uang Rp 1,4 miliar, logam mulia 1,9 kilogram, dan 12.500 dolar AS dari kediaman Yaya.</p>	
9	11 Mei 2018	09	<p>Pimpinan JAD Pekanbaru Terduga Provokator Kerusuhan</p>	<p>Kepala Kepala Forensik RS Polri Kramajati Kombes Pol Edi Purnomo akhirnya membuka identitas pria yang didorong di kursi roda tersebut. edi membenarkan jika pria tersebut adalah Wawan Kurniawan alias Abu Afif. "Iya, masih diobservasi," ujarnya saat dihubungi melalui pesan <i>WhatsApp</i> kemarin.</p> <p>Hanya sekitar 30 menit dia diperiksa di IGD. Selanjutnya, Abu Afif dirawat di kamar VIP RS Polri. "Luka di bahu kiri," ujar Edi. Namun, Edi enggan menjelaskan lebih lanjut penyebab luka yang diderita Abu Afif. <i>Abu Afif diduga sebagai pemicu dan provokator kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa lalu (8/5). Pemicunya adalah makanan yang dikirim oleh keluarganya tak</i></p>	11 Mei 2018 lampiran 9 halaman 96

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SAMBUNGAN TABEL I

				<p><i>kunjung diberikan petugas. Dia lalu memprovokasi napi lainnya untuk berontak, menjebol terali besi, dan menyerang petugas, wawan ditahan di Mako Brimob lantaran terlibat kasus terorisme.</i></p>	
10	12 Mei 2018	10	Tingkatkan pengawasan pendistribusian Elpiji	<p>Dengan mengetahui jadwal masuknya elpiji, pihaknya dapat turun dan melakukan pengawasan setiap pangkalan yang ada di bukit raya dan bisa langsung bertindak jika terjadi kelangkaan gas di wilayahnya. “Di bukit raya ada 69 pangkalan elpiji bersubsidi. Mereka nanti akan kami surati untuk diberi pembinaan dan pengarahan supaya tidak melakukan penyelewengan,”. Jelasnya Pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap pengusaha pangkalan yang menyusahkan masyarakat. Seperti menjual elpiji pada bukan peruntukannya seperti dijual ke pedagang atau diecer kembali. “Ingat, jika <i>bermain</i> dan terbukti maka rekomendasi putusan (PHU) hubungan usaha akan kami kirim ke DPP,” tutupnya.</p>	12 Mei 2018 lampiran 10 halaman 97

SAMBUNGAN TABEL I

11	13 Mei 2018	11	Warga Pundi Kayu Dan PT CSS Memanas	KETEGANGAN setempat <i>mewarnai</i> hubungan warga Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Citra Sumber Sejahtera (CSS). Pasalnya, warga setempat menghentikan paksa alat berat milik perusahaan tersebut.	13 Mei 2018 lampiran 13 halaman 98
12	14 Mei 2018	12	Segera tutup panti pijat	Tempat <i>prostitusi berkedok panti pijat dan spa</i> masih marak di Pekanbaru. Berdasarkan penelusuran Riau Pos, salah satunya ditemukan di jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai. Sepanjang jalan tersebut ditemukan beberapa <i>panti pijat tradisional tanpa izin</i> . Namun dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihak kelurahan Maharatu terus memantau agar panti pijat ini ditutup agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi mengganggu masyarakat dalam beribadah selama Ramadhan. Hingga saat ini kita belum mendapatkan laporan dari masyarakat tentang <i>panti pijat plus-plus</i> . Namun berdasarkan pantauan kami <i>ada satu</i>	14 Mei 2018 lampiran 14 halaman 99

SAMBUNGAN TABEL I

				<i>atau dua panti pijat yang masihi dicurigai masih buka.</i>	
13	17 Mei 2018	13	Investor Mulai Cemaskan Keamanan	<p>Seperti diketahui, aksi teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo Ahad (13/5) dan Senin (14/5) lalu. Selanjutnya, aksi teroris kembali terjadi, Rabu (16/5). Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda) Riau diserang oleh kawan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai. Samsul menuturkan, kondisi tersebut <i>turut mempengaruhi persepsi</i> para investor yang berimbas pada kecemasannya mereka di dalam negeri. “Jadi semakin banyak gangguan keamanan yang terjadi, maka persepsi atas keamanan di negara kita semakin menurun. Persepsi itu mempengaruhi keputusan si investor,”ujarnya di Gedung BEI, Rabu(16/5). Samsul menyampaikan, pemerintah tidak bisa hanya memberikan jaminan fundamental ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah harus meyakinkan soal</p>	13 Mei 2018 lampiran 13 halaman 100

SAMBUNGAN TABEL I

			<p>keberlangsungan investasi dari para investor di Indonesia, terutama dalam kondisi genting saat ini.</p> <p><i>Pasalnya, secara fundamental ekonomi, Indonesia masih kuat. Namun, bukan tidak mungkin jika fundamental ekonomi dapat terimbas kondisi keamanan yang terguncang. "Ini yang sebenarnya kita jaga, supaya investor tidak merasa bahwa investasi mereka di Indonesia bisa terhambat," imbuhnya. Pihaknya berharap agar kerjasama dari pihak pemerintah dan keamanan dapat segera mengatasi kondisi ini. Sebab, tidak bisa dipungkiri, keamanan yang goyah turut melemahkan sisi perekonomian.</i></p> <p><i>"Investor sebenarnya sudah cukup imun dengan kondisi ini, tapi kan harapan kita ini bisa diatasi secepatnya oleh pihak keamanan agar lebih aman dan investor nyaman untuk investasi,"ujarnya.</i></p>
--	--	---	---

SAMBUNGAN TABEL I

14	22 Mei 2018	14	Plt Gubernur tak dilibatkan kemenag	<p>Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim (WTH) <i>meradang</i>. Ia kesal dan <i>berang</i> karena merasa diacuhkan Kementerian Agama (Kemenag) RI perihal rencana realisasi Embarkasi Haji Antara (EHA) 2018 Provinsi Riau. Kemudian kemenag RI diketahuinya belakangan mengirim tim tanpa diketahui pemprov.</p> <p>“Mengadulah Asisten I (Ahmad Syah Harrofie) kepada saya, ternyata persis dugaan saya, dia (tim kemenag) didampingi Kanwil Agama. Kita ini jadi <i>kambing congek</i>, sama saya tidak ada tu, besok saya menghadap Moeldoko, minta beliau tanya langsung soal keseriusan Menteri Agama, karena rakyat kita sudah menunggu itu,”paparnya.</p>	22 Mei 2018 lampiran 14 halaman 101
15	24 Mei 2018	15	Oknum ASN dan Honorer Dipolisikan	Oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial Fir (50) berwsama onum honorer bersinisial Azh (43) dipolisikan oleh Aswari yang juga	24 Mei 2018 lampiran 15 halaman 102

SAMBUNGAN TABEL I

			<p>sama-sama ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). <i>Pasalnya, oknum ASN bersama honorer tersebut diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza.</i></p> <p><i>Di mana laporan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut sudah diterima Satreskrim Polres Inhu pada Jumat (18/5) pekan kemarin. Dalam laporan tersebut ada oknum ASN berinisial Fir bertugas di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Inhu dan Ahz, oknum honorer di salah satu kantor camat sebagai terlapor.</i></p> <p>Diakuinya, laporan polisi dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Avanza ke Mapolres Inhu ini, adalah tindak lanjut laporan di Mapolsek Rengat Barat pada 4 November 2014.</p> <p>Untuk penetapan tersangka dan dugaan keterlibatan orang lain sambungnya, harus dilakukan gelar perkara. Bahkan pihaknya, juga telah</p>	
--	--	---	---	--


SAMBUNGAN TABEL I

				menjadwalkan gelar perkara pada pekan depan. <i>“Sepertinya laporan di Polsek Rengan Barat tidak sesuai dengan kejadiannya. Sehingga wajar saja ada laporan baru di Satreskim,” terangnya.</i>	
16	27 Mei 2018	16	Diskes Diminta Hentikan Operasi DAMIU Tak Sehat	<p><i>Banyaknya depot minum isi ulang (DAMIU) yang diindikasikan tidak layak konsumsi, membuat masyarakat menjadi resah. Pasnya, jika salah meminumnya akan berdampak buruk bagi kesehatan.</i></p> <p>Diungkapkan amrizal yang merupakan mantan anggota DPRD pelalawan periode pertama terbentuknya Kabupaten Pelalawan, jika Dinas Kesehatan masih memberikan toleransi terhadap permasalahan yang langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat, maka tentunya akan berdampak sangat buruk.</p>	27 Mei 2018 lampiran 16 halaman 103
17	28 Mei 2018	17	Karyawan Mogok,PT Sun Lumpuh	KARYAWAN PT Sinar Utama Nabati (SUN) melakukan aksi <i>mogok kerja</i> , sejak empat hari yang lalu.	28 Mei 2018 lampiran 17 halaman 104

SAMBUNGAN TABEL I

					<p>Akibatnya, pabrik kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi tersebut <i>lumpuh</i>. Selain tidak adanya aktivitas, perusahaan tersebut harus <i>menelan</i> kerugian dengan membusuknya ratusan ton buah sawit yang akan diproduksi. <i>Mogoknya</i> puluhan karyawan tersebut dikarenakan adanya sebagian tuntutan yang belum di setujui oleh pihak perusahaan. Terutama masalah jam kerja dan <i>mutasi karyawan</i> yang dinilai merugikan karyawan.</p>	
18	28 Mei 2018	18	Tegur Petani Tak Tanam Bibit Sawit Bantuan Pemeritah	<p>TELUKKUANTAN (RP)- Juru bicara DPRD Kuansing, Drs Darmizar saat menyampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing tahun 2017 <i>menyoroti bantuan sawit yang disalurkan gratis kepada para petani “Bibit sawit yang masih belum ditanam oleh masyarakat penerima bantuan itu supaya dicek ke lapangan. Dan diberi</i></p>	28 Mei 2018 lampiran 18 halaman 105	

SAMBUNGAN TABEL I

			<p><i>peringatan oleh Dinas Pertanian,” ujar Darmizar saat sampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing, belum lama ini. Karena itu, Politisi PPP Kuansing ini mendesak agar Pemkab Kauning melalui Dinas Pertanian menegur atau memberi peringatan kepada para petani yang didapati tidak menanam bibit sawit yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu. Pasalnya, kata DPRD, pihaknya menduga banyak petani yang belum menanam bibit sawit tersebut. “Harus di cek ke lapangan. Pastikan bibit sawit yang dibantu itu mereka tanami. Kalau masih ada yang belum, tegur mereka. Apa masalah sehingga mereka tidak menanam,” ujarnya.</i></p> <p>Sebelumnya, anggota DPRD Kuansing lainnya, Jefri Antoni ST berulang-kali mengingatkan agar bibit yang diserahkan gratis kepada masyarakat itu tepat sasaran. Dan disalurkan</p>
--	--	---	---

SAMBUNGAN TABEL I

					<p>kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk ketersediaan lahannya. <i>“Sudahlah bibit itu kualitasnya kurang. Penyalurannya pun tak tepat. Makanya, pastikan yang menerima bibit itu masyarakat kita yang butuh. Lahannya ada,”</i> kata Politisi Demokrat itu.</p>	
19	29 Mei 2018	19	<p>Demo, Mahasiswa Tuding Ada Monopoli Proyek di Kampar</p>	<p>BANGKINANG (RP)-Puluhan mahasiswa yang menyebut diri sebagai Mahasiswa Pemuda Kampar (Gempar), menggelar aksi unjuk rasa atau demo di halaman depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Senin (28/5). Para mahasiswa dan pemudan ini menuding adanya monopoli dalam pembagian proyek-proyek di Pemkab Kampar. Koordinator aksi unjuk rasa Elangga menyebutkan, mereka curiga ada pengaturan dalam proses lelang proyek selama 2017 dan 2018. Hanya saja Elangga dalam orasinya juga tidak menyebut paket proyek mana yang dicurangi tersebut.</p>	29 Mei 2018	lampiran 19 halaman 106

SAMBUNGAN TABEL I

				<p> <i>“Bahwa ada permainan dalam proses lelang itu sudah nyata. Namun belum ada tindakan dari penegak hukum. Tidak ada gunanya lagi mengikuti lelang, karena perusahaan pemenangnya sudah ada,”</i> ungkapnya. </p> <p> Sekda Kampar Yusri yang berhasil dihubungi wartawan sore kemarin menyebutkan, para pendemo itu bukan tidak ditemui pemkab. Tapi waktu aksi mereka terlalu singkat dan mereka juga menggelar demo berdekatan dengan waktu salat Zuhur. Hingga ketika adzan sudah mulai dekat, baik pendemo maupun Pemkab Kampar sudah sama-sama tidak ada waktu lagi. </p> <p> <i>Ketika ditanya terkait tudingan monopoli proyek, Yusri tidak yakin itu benar. Malah menurut Yusri, kalau mahasiswa yakin dan punya bukti, dirinya menyarankan agar pendemo menemui satker terkait langsung. “Bisa langsung ke satker saja kalau memang</i> </p>	
--	--	--	---	---	--

SAMBUNGAN TABEL I

					<i>ada yang katanya seperti itu, itu saran saya” Terangnya.</i>	
20	31	Mei	20	Teroris, Waspadai Pendatang Baru	Bengkalis (RP)- Terkait ditangkapnya terduga teroris oleh densus 88 Anti Teror di kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Bupati Bengkalis Amril Mukminin meminta masyarakat daerah ini, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru. “Belum lama ini, densus 88 menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai teroris	31 Mei 2018 lampiran 20 halaman 107

2.2 Analisis Data

Berdasarkan deskripsi data yang sudah ditunjukkan sebelumnya mengenai Marjinalisasi dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* edisi Mei 2018, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data terhadap data yang sudah dideskripsikan tersebut berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada empat jenis marjinalisasi yang akan dianalisis. Keempat jenis tersebut yaitu: *eufemisme* (penghalusan makna), *disfemisme* (bahasa pengasaran), *labelisasi*, dan *stereotype*. Analisis ini dilakukan pada setiap indikator marjinalisasi (*eufemisme*, *disfemisme*, *labelisasi*, dan *stereotype*) secara berurutan yang dideskripsikan dalam sebuah paragraf.

2.2.1 Analisis Marjinalisasi *Eufemisme* (Peghalusan Makna)

Berdasarkan pada kode data 01, 05, 07, 11, 13. Terdapat marjinalisasi jenis *Eufemisme*. *Eufemisme* (penghalusan makna) adalah pemakaian kata-kata untuk mengubah realitas (kejadian) yang buruk atau kasar berubah menjadi halus, akibatnya khalayak (masyarakat) atau pembaca tidak mampu melihat kenyataan sebenarnya yang digunakan oleh jurnalis dalam menulis teks beritanya. *Eufemisme* merupakan strategi yang paling banyak digunakan oleh media (Eriyanto, 2008:125). Salah satu alasan kenapa *eufemisme* lebih banyak diterapkan dalam tulisan di media cetak karena *eufemisme* lebih cocok digunakan untuk menggambarkan tindakan pelaku sosial secara individu/kelompok/lembaga kepada masyarakat ke bawah (Eriyanto, 2008:125). Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

Dibandingkan tahun 2015, peringkat kita memang turun drastis dari 233 se-Indonesia. Dianto menjelaskan bahwa LPPD merupakan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif pemerintah pusat dalam mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda. Terutama dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. “*Penurunan kinerja pemerintah itu disebabkan banyak indikator. Diantaranya, lambatnya pengesahan APBD, transparansi anggaran, kedisiplinan ASN dan masih banyak lagi. Artinya, penilaian itu berdasarkan kondisi di lapangan. Termasuk soal pengisian data yang diminta pemerintah pusat,*” kata dianto. (kode 01)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 1 Mei 2018 dengan judul berita “Kinerja terburuk Se- Riau.” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah Pemkab Kuansing yang menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kuansing. *Eufemisme* tampak

digunakan pada paragraf yang dicetak miring. Melalui paragraf tersebut, menjelaskan bahwasannya banyak indikator yang mempengaruhi penurunan kinerja pemerintah Kuansing. Yakni dijelaskan bahwasannya *lambatnya pengesahan APBD*, APBD adalah salah satu anggaran atau dana yang paling berpengaruh dalam kinerja pemerintah kuansing karena tanpa dana, rencana yang telah dianggarkan oleh pemerintah kuansing yang nantinya akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kinerja pemerintah kuansing tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu, *transparansi anggaran*, transparansi anggaran adalah anggaran yang sudah dirincikan oleh pihak pemerintahan yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dianggarkan karena merupakan salah satu sebab terhambatnya kinerja pemkab Kuansing dari kalimat tersebut membuat penilaian bahwa anggaran yang telah dirincikan pemerintah tidak sesuai di lapangan (kondisi) diibaratkan Pemkab Kuansung akan melakukan penyelewengan dana. Dipertegas kembali dari kalimat yakni *penilaian itu berdasarkan kondisi di lapangan. Termasuk soal pengisian data yang diminta pemerintah pusat* merupakan penurunan kinerja pemerintah kabupaten Kuansing karena tanpa dana pemerintah kabupaten Kuansing tidak akan bekerja, anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah, belum disetujui oleh pihak DPRD, pemerintah kesannya tidak akan membantu masyarakat kalau tidak adanya uang dalam setiap menjalankan tugasnya, Pemerintah terkesan tidak mau melayani tiap tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah terkesan tidak ikhlas membantu masyarakat.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “*kehilangan*” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar. (kode 05)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 5 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Waspada Setnov Ajukan PK” yang menjadi pelaku sosial adalah Setya Novianto selaku tersangka korupsi yang akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai hukum melawan putusan hakim. Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Andreas Marbun Marbun menghimbau kepada masyarakat harus tetap mengawasi pergerakan dari seorang tersangka korupsi yakni Setnov karena saat ini kondisi Mahkamah Agung (MA) “*kehilangan*” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini.

Bagi masyarakat umum, istilah Waspada hanya akan dipahami kalau ada bahaya secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan waspada yang terdapat dalam isi berita yang mereka baca. Berita yang dimaksud adalah marbun mengingatkan pada masyarakat agar tidak lengah memperhatikan gerak-gerik Setnov yang diisukan akan mengajukan peninjauan kembali sebagai cara untuk melawan putusan hakim karena Marbun menganggap Mahkamah Agung (MA)

“kehilangan” sesosok hakim pidana yang garang. Untuk membantu masyarakat dalam memahami istilah tersebut, jurnalis menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan kata “kehilangan” yang berarti hilangnya sesuatu. Jadi, kata “kehilangan” dalam konteks berita tersebut adalah tidak adanya sesosok hakim yang adil dalam menghukum koruptor atau tidak memihak dan dalam pandangan marbun sebagai MaPPi menilai MA saat ini membutuhkan sesosok Hakim yang tegas dan keras dalam menghukum koruptor agar tidak ada lagi yang berbuat korupsi di Indonesia.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Yang dilaporkan itu oknum polisi inisial SR berpangkat Kopol, dan bertugas di Polda Riau. Mobil ini milik korban, dipinjam oleh oknum polisi sejak 7 April 2018. Namun, hingga saat ini, mobil itu belum dikembalikan. “Dia (oknum, red) sudah saya laporkan ke Propam Polda Riau untuk pertanggungjawabannya atas mobil yang dipinjamkan,” ungkap Syamsuardi, kemarin. Kode 07)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 6 Mei 2018 dengan judul berita “Diduga larikan mobil oknum polisi dilaporkan.” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah seorang polisi yang berpangkat Kopol *eufemisme* tampak digunakan pada paragraf yang dicetak miring. Melalui paragraf tersebut, oknum polisi yang berpangkat kopol dan bertugas di Polda Riau meminjam mobil seorang tetangganya namun, oknum tersebut tidak mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya, Syamsuardi pun mengambil salah satu tindakan dengan melaporkan oknum tersebut ke Propam Polda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oknum polisi tersebut

awalnya berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan syamsuardi mulai dari mobil tersebut dipinjam kawannya hingga mobil tersebut dinyatakan hilang saat ditanyakan oleh syamsuardi mengenai dimana mobil miliknya yang hingga saat ini belum kunjung dikembalikan. kesannya oknum yang dilaporkan tidak menjaga amanat dan menjaga kepercayaan yang diberikan syamsuardi dalam meminjam mobil miliknya tersebut dan terkesan tidak bertanggung jawab, kalau dalam hal meminjam sebuah barang saja seorang oknum polisi tidak bertanggungjawab bagaimana dengan tugas yang diembannya.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KETEGANGAN sempat mewarnai hubungan warga Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Citra Sumber Sejahtera (CSS). Pasalnya, warga setempat sempat menghentikan paksa alat berat milik perusahaan tersebut.(kode 11)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 13 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Warga Pundi Kayu Dan PT CSS Memanas” yang menjadi pelaku sosial adalah warga Desa Pundi Kayu yang merasa resah dengan pengerjaan alat berat milik PT Citra Sumber Sejahtera (CSS). Karena warga merasa PT CSS telah melanggar kesepakatan dengan mereka mengenai lahan yang disengketakan.

Bagi masyarakat umum, istilah memanas hanya akan dipahami kalau ada dua kelompok yang bersitenggang secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan *memanas*

yang terdapat dalam isi berita yang mereka baca. Berita yang dimaksud adalah sekelompok warga merasa resah karena PT CSS telah melanggar kesepakatan dengan mereka mengenai lahan yang disengketakan dengan menanam tanaman akasia diantara sawit milik warga. Untuk membantu masyarakat dalam memahami istilah tersebut, jurnalis menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan kata “mewarnai” yang berarti suatu keadaan itu tidak tegang atau terjadi keributan. Jadi, kata “mewarnai” dalam konteks berita tersebut adalah tergolong dalam *eufemisme* karena penghalusan makna dari kata mewarnai tersebut tidak ada kegiatan yang menyebabkan tumpah darah atau terkesan anarkis.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Samsul menuturkan, kondisi tersebut *turut mempengaruhi persepsi* para investor yang berimbas pada kecemasannya mereka di dalam negeri. “Jadi semakin banyak gangguan keamanan yang terjadi, maka persepsi atas keamanan di negara kita semakin menurun. Persepsi itu mempengaruhi keputusan si investor,”ujarnya di Gedung BEI, Rabu(16/5).

Samsul menyampaikan, pemerintah tidak bisa hanya memberikan jaminan fundamental ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah harus meyakinkan soal keberlangsungan investasi dari para investor di Indonesia, terutama dalam kondisi genting saat ini.

Pasalnya, secara fundamental ekonomi, Indonesia masih kuat. Namun, bukan tidak mungkin jika fundamental ekonomi dapat terimbas kondisi keamanan yang terguncang.”Ini yang sebenarnya kita jaga, supaya investor tidak merasa bahwa investasi mereka di Indonesia bisa terhambat,”imbuhnya.

Pihaknya berharap agar kerjasama dari pihak pemerintah dan keamanan dapat segera mengatasi kondisi ini. Sebab, tidak bisa dipungkiri, keamanan yang goyah turut melemahkan sisi perekonomian. “Investor sebenarnya

sudah cukup imun dengan kondisi ini, tapi kan harapan kita ini bisa diatasi secepatnya oleh *pihak keamanan agar lebih aman dan investor nyaman untuk investasi,*”ujarnya. (kode 13)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 17 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Investor Mulai Cemaskan Keamanan” yang menjadi pelaku sosial adalah Investor yang mulai mencemaskan keamanan di Indonesia dengan adanya aksi teror bom bunuh diri di Sidoarjo dan aksi teroris di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau yang diserang oleh kawan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai.

Aksi teror bom bunuh diri dan teroris tersebut dianggap mempengaruhi pasar saham Indonesia yang belum bisa bangkit kembali dari ke level 6.000-an. Menurut Samsul Hidayat selaku Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan sulitnya bangkit IHSG yang bangkit dari zona merah tak terlepas dari isu aksi terorisme yang mengusik keamanan Indonesia dalam beberapa hari terakhir., dengan aksi terorisme tersebut membuat investor mulai cemas dengan keamanan di Indonesia. Padahal Indonesia sudah memberikan jaminan fundamental ekonomi kepada investor terhadap keberlangsungan investasi di Indonesia.

Bagi masyarakat umum, istilah investor cemas keamanan tidak akan dipahami secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan istilah investor yang mencemaskan keamanan di Indonesia. Untuk membantu masyarakat dalam

memahami istilah tersebut, jurnalis menyederhanakan bahasanya kondisi keamanan di Indonesia saat ini sedang goyah yang menyebabkan melemahnya sisi perekonomian.

2.2.2 Analisis Marjinalisasi *Disfemisme* (Bahasa Pengasaran)

Berdasarkan pada kode data 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18. Terdapat marjinalisasi jenis *disfemisme*. Jika *eufemisme* mengenai penghalusan makna, *disfemisme* sebaliknya. Praktik wacana *disfemisme* yakni pemakaian bahasa pengasaran. Ketika *eufemisme* dapat mengakibatkan realitas yang halus, *disfemisme* sebaliknya dapat mengakibatkan realitas menjadi kasar (Eriyanto, 2008:125). *Disfemisme* umumnya sering digunakan untuk menyebut tindakan yang dilakukan masyarakat bawah. Namun, ternyata pada praktiknya *disfemisme* digunakan tidak hanya untuk masyarakat bawah saja tetapi juga bisa digunakan untuk kalangan kelas atas. Misalnya, untuk sebuah nama kelompok atau instansi besar. Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi. Ia meminta jika kedatangan, *mafia sembako* agar langsung ditangkap. (kode 03)

Kutipan teks berita tersebut diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi, 2 Mei 2018 dengan judul “Polisi Diminta Tangkap “Pemain” sembako”. Dari judul berita, pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata yang miring. Frasa *mafia sembako* merupakan penyebutan yang dilakukan kalangan pengusaha kepada masyarakat bawah. Dengan penyebutan frasa tersebut terkesan

kasar karena penggunaan kata *mafia* itu sendiri adalah perkumpulan yang bergerak dibidang kejahatan.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) pekanbaru *mencium* adanya dugaan korupsi dalam pembangunan drainase jalan soekarno hatta, pekanbaru pada 2016. Dugaan korupsi ini sedang diusut.

Pengerjaan proyek dilakukan dari simpang jalan Riau hingga Mal Ska Pekanbaru. Diduga, pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Saat itu, Komisi yang membidangi infrastruktur kecewa dengan sejumlah proyek itu. *pasalnya proyek tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan*. Akibatnya, hasilnya tampak *amburadul* dan tidak sesuai dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah. (kode 04)

kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang diterbitkan surat kabar Riau Pos edisi 4 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan stragtegi misreprensentasi kategori *disfemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Diusut Proyek Drainase Rp 11,4 M “ pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *mencium*. Melalui penggunaan kata tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru merasa curiga terhadap proyek pembangunan drainase pada jalan yang menelan anggaran Rp 11,4 M. Karena pengerjaan proyek tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan dapat dilihat pada teks diatas yang dicetak tebal. Kata *mencium* diindikasikan kasar karena Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru ingin mengusut mengenai proyek tersebut hanya karena merugikan keuangan negara. Ditambah dengan pernyataan dari komisi yang membidangi infrastruktur yang menyebutkan pengerjaan proyek

tersebut asal-asalan, amburadul dan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan negara.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. *Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar.* (kode 05)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 5 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *garang* merupakan penyebutan yang dilakukan kalangan atas yakni Seorang Mahkamah Konstitusi yang terkenal dengan sikap kerasnya dalam menghukum koruptor. Penggunaan kata *garang* tergolong kasar karena penyebutan tersebut adalah terkesan sangar, pemaarah dengan konotasi negatif. Padahal dalam masalah ini sebenarnya mengandung konotasi positif karena tidak ada MA yang berani menghukum koruptor segarang MA yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Ia berharap BLH dapat bekerja dengan jujur. Bahkan ia mengingatkan BLH agar tidak bermain mata dengan perusahaan. Karena masalah tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jika dalam kenyataan salah, maka BLH harus sampaikan sejujurnya. “Jangan sampai ada yang *bermain mata*. Coba saja kalau berani. Saya usut sampai tuntas,” tegas politisi Hanura itu. (kode 06)

Judul berita kutipan teks di atas adalah “Dewan Minta Kasus PT Duta Palma Diusut Tuntas” diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos, edisi , 5 Mei 2018. Melalui kutipan teks berita tersebut Suhardiman Amby selaku Dewan Politisi Hanura, yang menuturkan bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) dikabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang menjadi pelaku sosial dalam kutipan teks berita. Ia menduga ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Duta Palma yang menyebabkan air sungai yang tercemar oleh limbah dari PT tersebut. Suhardiman Amby menyebutkan bahwa jangan sampai BLH *bermain mata* dengan perusahaan, karena tugas dari BLH itu ialah menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Ia berharap BLH dapat bekerja dengan jujur, karena masalah ini menyangkut masyarakat banyak. Frasa *bermain mata* yang diungkapkan oleh Suhardiman Amby memiliki konotasi kurang baik atau kasar, yang artinya bekerjasama, ia berharap agar BLH dikabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mengemban tugasnya jangan sampai bekerjasama dalam mengusut kasus pencemaran sungai kukok tersebut. Ungkapan yang dituturkan oleh DPRD Riau Dapil Kuansing Suhardiman Amby mengenai BLH dikabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dipandang buruk dan tidak bekerja dengan jujur. Maka itu, ia berharap agar BLH harus menyampaikan sejujurnya mengenai pencemaran sepanjang aliran sungai kukok. Jadi, dengan adanya kutipan teks berita tersebut pendapat Eriyanto sebelumnya yang menyatakan *disfemisme* hanya untuk kategori masyarakat bawah terbantahkan.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

SUAP Rp500 juta *mengegolkan* usulan pembangunan melalui dana perimbangan keuangan daerah tidak lepas

dari peran Yaya Purnomo. Yakni seorang Kepala Seksi (Kasi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman ditjen perimbangan kementerian keuangan. KPK pun mendalami keterlibatan pejabat yang diduga sering *mendapat hadiah* dari daerah itu. Bahkan, uang yang disita dari apartemen Yaya di wilayah Bekasi lebih besar dari uang suap yang diterima Amin Satono, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat dan Eka Kamaludin, selaku perantara. Dalam *operasi tangkap tangan* (OTT) yang dilakukan pada Jumat (4/5) lalu, KPK berhasil mengamankan uang Rp 1,4 miliar, logam mulia 1,9 kilogram, dan 12.500 dolar AS dari kediaman Yaya. (kode 08

Judul berita kutipan teks di atas adalah “Daerah diduga Sering beri Suap” diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos, edisi 7 Mei 2018. Melalui kutipan teks berita tersebut jurnalis menggunakan kata *mengegolkan*. Melalui penggunaan kata tersebut menjelaskan bahwa seorang Kepala Seksi (Kasi pengembangan pendanaan Kawasan perumahan dan pemukiman ditjen perimbangan kementerian keuangan) yakni Yaya Purnomo yang diidentifikasi terlibat kasus suap yang tidak lepas dari perannya. KPK pun saat ini sedang mendalami keterlibatan Yaya. Yaya diduga sering *mendapat hadiah* dari daerah sebagai upah tutup mulutnya mengenai pembangunan tersebut. Dalam *operasi tangkap tangan* KPK berhasil mengamankan uang Rp 1,4 miliar, 1,9 kilogram logam mulia dan 12.500 dolar AS dari kediamannya. Kata *mengegolkan* diindikasikan kasar karena seolah Yaya Purnomo berjuang dengan susah payah untuk usulan pembangunan yang sebenarnya sangat mudah dilakukan oleh kalangan atas yang memiliki banyak uang.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Dengan mengetahui jadwal masuknya elpiji, pihaknya dapat turun dan melakukan pengawasan setiap pangkalan yang

ada di bukit raya dan bisa langsung bertindak jika terjadi kelangkaan gas di wilayahnya. “Di bukit raya ada 69 pangkalan elpiji bersubsidi. Mereka nanti akan kami surati untuk diberi pembinaan dan pengarahan supaya tidak melakukan penyelewengan,”. Jelasnya Pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap pengusaha pangkalan yang menyusahkan masyarakat. Seperti menjual elpiji pada bukan peruntukannya seperti dijual ke pedagang atau diecer kembali. “Ingat, jika *bermain* dan terbukti maka rekomendasi pemutusan (PHU) hubungan usaha akan kami kirim ke DPP,” tutupnya. (kode 10)

Pada kutipan teks berita dengan judul “Tingkatkan Pengawasan Pendistribusian Elpiji” edisi 12 Mei 2018 pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *bermain*. Melalui penggunaan kata tersebut menjelaskan mengenai gas elpiji yang ada di setiap pangkalan di Kecamatan Bukit Raya harus melakukan pemantauan dan turun langsung mengawasi. Kata *bermain* diindikasikan kasar karena kegiatan apapun yang dilakukan oleh pihak pengusaha pangkalan yang dianggap merugikan masyarakat dengan cara di ecer kembali. Ditambah dengan pernyataan dari Camat Bukit Raya Maskur Tarmizi akan menindak lanjuti pangkalan tersebut dan Pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap pengusaha pangkalan yang menyusahkan masyarakat. Seperti menjual elpiji pada bukan peruntukannya seperti dijual ke pedagang atau diecer kembali. “Ingat, jika *bermain* dan terbukti maka rekomendasi pemutusan (PHU) hubungan usaha akan kami kirim ke DPP,” tutupnya.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KETEGANGAN sempat mewarnai hubungan warga Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Citra Sumber Sejahtera

(CSS). *Pasalnya, warga setempat sempat menghentikan paksa alat berat milik perusahaan tersebut.*(kode 11)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 13 Mei 2018 selain terdapat marjinalisasi *eufemisme* juga terdapat praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut tampak pada kata *menghentikan paksa* yang diindikasikan kasar karena tindakan yang dilakukan masyarakat bawah kepada kalangan atas yakni pihak perusahaan yang alat berat milik perusahaan diberhentikan paksa oleh masyarakat karena tergolong kegiatan yang anarkis.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Tempat *prostitusi berkedok panti pijat dan spa* masih marak di Pekanbaru. Berdasarkan penelusuran Riau Pos, salah satunya ditemukan di jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai. Sepanjang jalan tersebut ditemukan beberapa *panti pijat tradisional tanpa izin*.

Namun dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihak kelurahan Maharatu terus memantau agar panti pijat ini ditutup agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi mengganggu masyarakat dalam beribadah selama Ramadhan. Hingga saat ini kita belum mendapatkan laporan dari masyarakat tentang *panti pijat plus-plus*. Namun berdasarkan pantauan kami *ada satu atau dua panti pijat yang masihi dicurigai masih buka*. (kode 12)

Judul berita kutipan teks di atas adalah “Segera Tutup Panti Pijat” diterbitkan oleh surat kabar harian Riau Pos, edisi 14 Mei 2018. Melalui kutipan teks berita tersebut, jurnalis ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pekanbaru. Bahwa, tidak semua panti pijat tradisional dan spa di jalan kartama Kecamatan Marpoyan Damai ini dijalankan dengan legal. Panti pijat tidak hanya memberikan pelayanan untuk pijat tetapi juga pelayanan prostitusi begtu juga dengan spa. Jurnalis menggunakan istilah *prostitusi* bagi panti pijat yang mejadi

pelaku sosial dalam kutipan teks berita tersebut. Istilah *prostitusi* digunakan bagi individu atau kelompok yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui pelayanan seks secara ilegal. Hal tersebut hanya dilakukan bagi seseorang atau kelompok tertentu yang membutuhkan uang. Dengan kata lain, seseorang atau kelompok tertentu yang dikategorikan masyarakat bawah.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim (WTH) *meradang*. Ia kesal dan *berang* karena merasa diacuhkan Kementerian Agama (Kemenag) RI perihal rencana realisasi Embarkasi Haji Antara (EHA) 2018 Provinsi Riau.

Kemudian kemenag RI diketahuinya belakangan mengirim tim tanpa diketahui pemprov. “Mengadulah Asisten I (Ahmad Syah Harroffie) kepada saya, ternyata persis dugaan saya, dia (tim kemenag) didampingi Kanwil Agama. Kita ini jadi *kambing congek*, sama saya tidak ada tu, besok saya menghadap Moeldoko, minta beliau tanya langsung soal keseriusan Menteri Agama, karena rakyat kita sudah menunggu itu,” paparnya. (kode 14)

kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang diterbitkan surat kabar Riau Pos edisi Selasa, 22 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi kategori disfemisme. Pada kutipan teks berita dengan judul “Plt Gubri berang, tak dilibatkan kemenag” pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana disfemisme. Hal tersebut terlihat pada penggunaan frasa *kambing congek*. Melalui penggunaan frasa tersebut H Wan Thamrin Hasyim ingin menyampaikan kepada pembaca bahwasannya ia merasa diacuhkan Kementerian Agama Republik Indonesia perihal rencana realisasi Embarkasi Haji Antara (EHA) 2018 Provinsi Riau. H Wan Thamrin Hasyim merasa bahwasannya ia sebagai Plt Gubernur Riau hanya

sebagai *kambing congek*, frasa tersebut memiliki konotasi kurang sedap atau kasar yang bermakna dungu atau bodoh mengenai rencana EHA 2018 Provinsi Riau yang dianggap tidak terealisasi sesuai dengan rencananya.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Banyaknya depot minum isi ulang (DAMIU) yang diindikasikan tidak layak konsumsi, membuat masyarakat menjadi resah. Peralnya, jika salah meminumnya akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Diungkapkan amrizal yang merupakan mantan anggota DPRD pelalawan periode pertama terbentuknya Kabupaten Pelalawan, jika Dinas Kesehatan masih memberikan toleransi terhadap permasalahan yang langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat, maka tentunya akan berdampak sangat buruk. (kode 16)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 27 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan *Banyaknya depot minum isi ulang (DAMIU) yang diindikasikan tidak layak konsumsi dan Peralnya, jika salah meminumnya akan berdampak buruk bagi kesehatan* yang ditujukan pada Dinas Kesehatan (Diskes) Melalui penggunaan bahasa tersebut, jurnalis ingin menyampaikan kepada masyarakat terutama Dinas Kesehatan jika selama ini masih ada belasan atau 20 persen lagi DAMIU yang belum memenuhi syarat konsumsi. Peralnya, Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan dr Endit R Pratiknyo menyebutkan, Diskes pelalawan belum lama ini telah menemukan belasan DAMIU di pelalawan yang belum memenuhi kriteria sehat dan layak untuk diminum. Padahal sudah sangat jelas minuman tersebut tidak layak konsumsi namun, Dinas Kesehatan masih memberikan toleransi terhadap permasalahan yang langsung berhubungan dengan

kesehatan masyarakat dengan masih banyaknya depot air minum isi ulang yang *tidak memiliki sertifikat layak sehat* karena mengandung bakteri *E.coli* yang dapat *merusak kesehatan* dan *berdampak sangat buruk*. Dalam kasus ini Diskes pelalawan terus melakukan pembinaan sebagai upaya agar seluruh DAMIU memenuhi kriteria sehat dan layak konsumsi yang dibekali sertifikat layak sehat, sehingga *tidak berdampak terhadap kesehatan masyarakat* dengan melakukan pemeriksaan 6 bulan sekali mengambil sampel air dari seluruh DAMIU untuk dilakukan pemeriksaan di Labkesda Pekanbaru, sehingga air yang *dikonsumsi masyarakat benar-benar sehat* atau layak konsumsi.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KARYAWAN PT Sinar Utama Nabati (SUN) melakukan aksi *mogok kerja*, sejak empat hari yang lalu. Akibatnya, pabrik kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi tersebut *lumpuh*. Selain tidak adanya aktivitas, perusahaan tersebut harus *menelan* kerugian dengan membusuknya ratusan ton buah sawit yang akan diproduksi.

Mogoknya puluhan karyawan tersebut dikarenakan adanya sebagian tuntutan yang belum di setujui oleh pihak perusahaan. Terutama masalah jam kerja dan *mutasi karyawan* yang dinilai merugikan karyawan. (kode 17)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 28 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori menggunakan praktik wacana disfemisme. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *mogok kerja*. Melalui penggunaan kata tersebut karyawan PT Sinar Utama Nabati (SUN) melakukan aksi mogok kerja. Istilah *mogok kerja* yang digunakan jurnalistik terkesan kasar. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan frasa

mogok kerja menurut KBBI adalah menghentikan kegiatan pekerjaan karena adanya tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan atau tempat bekerja dalam teks isi berita tersebut. Jadi, frasa *mogok kerja* dalam konteks berita tersebut adalah karyawan merasa pihak perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan lembur yang dikerjakan karyawan. Ditambah lagi dengan adanya *mutasi karyawan* yang dinilai merugikan karyawan hal tersebut terbukti dengan mengutus salah satu perwakilan untuk bertanya mengenai uang lembur digaji mereka nantik. Tetapi bukannya mendapat jawaban pihak perusahaan memutasikan karyawan tersebut. *Mutasi karyawan* tersebut dinilai merugikan karyawan sehingga mereka melakukan aksi mogok kerja yang menyebabkan PT SUN lumpuh atau tidak memproduksi sawit selama empat hari yang lalu. Menyebabkan karyawan terkesan tidak mau bekerja atau berhenti bekerja atau berhenti bekerja sesukanya.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

TELUKKUANTAN (RP)- Juru bicara DPRD Kuansing, Drs Darmizar saat menyampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing tahun 2017 *menyoroti bantuan sawit yang disalurkan gratis kepada para petani “Bibit sawit yang masih belum ditanam oleh masyarakat penerima bantuan itu supaya di-cek ke lapangan. Dan diberi peringatan oleh Dinas Pertanian,”* ujar Darmizar saat sampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing, belum lama ini.

Karena itu, Politisi PPP Kuansing ini *mendesak* agar Pemkab Kaunsing melalui Dinas Pertanian *menegur* atau memberi peringatan kepada para petani yang didapati tidak menanami bibit sawit yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu. Pasalnya, kata DPRD, *pihaknya menduga banyak petani yang belum menanami bibit sawit tersebut. “Harus di cek ke lapangan. Pastikan bibit sawit*

yang dibantu itu mereka tanami. Kalau masih ada yang belum, tegur mereka. Apa masalah sehingga mereka tidak menanam,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kuansing lainnya, Jefri Antoni ST berulang-kali mengingatkan agar bibit yang diserahkan gratis kepada masyarakat itu tepat sasaran. Dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk ketersediaan lahannya. *“Sudahlah bibit itu kualitasnya kurang. Penyalurannya pun tak tepat. Makanya, pastikan yang menerima bibit itu masyarakat kita yang butuh. Lahannya ada,”* kata Politisi Demokrat itu. (kode 18)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 28 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori menggunakan praktik wacana disfemisme. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *tegur*. Melalui penggunaan kata tersebut Drs Darmizar juru bicara DPRD Kuansing, menyampaikan pendapatnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing tahun 2017 mengenai bantuan berupa bibit sawit yang disalurkan secara gratis kepada para petani yang ia lihat penerima bantuan itu belum menanam bibit-bibit sawit tersebut. Istilah “menegur” yang digunakan jurnalistik terkesan kasar. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan kata *menegur* yang berarti dalam teks isi berita tersebut adalah memberi peringatan seolah-olah para petani melakukan kesalahan layaknya pekerja perusahaan atau karyawan yang mendapat gaji tetap. Jadi, kata *menegur* dalam konteks berita tersebut adalah memberi peringatan dan mendesak kepada para petani yang didapati tidak menanam bibit sawit tersebut yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Jefri Antoni ST yang Sebelumnya berulang-kali mengingatkan agar bibit yang

diserahkan gratis kepada masyarakat itu tepat sasaran. Dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk ketersediaan lahannya. *Sudahlah bibit itu kualitasnya kurang. Penyalurannya pun tak tepat. Makanya, pastikan yang menerima bibit itu masyarakat kita yang butuh. Lahannya ada*, dari pernyataan tersebut politisi Demokrat beranggapan penyaluran bibit sawit kepada masyarakat bawah tidak tepat sasaran sehingga petani yang mendapat bantuan dari anggaran miliaran rupiah tersebut terkesan mengacuhkan teguran dari DPDR kuansing.

2.2.3 Analisis Marjinalisasi Labelisasi

Berdasarkan pada kode data 03, 12, 20. Terdapat marjinalisasi jenis Labelisasi. Praktik wacana *labelisasi* adalah merupakan perangkat bahasa yang digunakan oleh mereka yang berada di kelas atas untuk menundukkan lawan-lawannya (Eriyanto, 2008:126). Praktik wacana dengan menggunakan labelisasi ini hampir sama dengan praktik wacana disfemisme. Namun, *labelisasi* dapat langsung teridentifikasi ketika ditemukannya pemberian “sebutan” atau “julukan” pada pelaku sosial yang dianggap memiliki kedudukan rendah oleh pelaku sosial yang memiliki kedudukan tinggi. Selain itu, labelisasi adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan.

Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

PEKANBARU(RP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau curiga ada permainan di tingkat distribusi sembako. Pasalnya, sejumlah instansi yang telah dimintai keterangan stok pangan di Provinsi Riau aman.

Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi. Ia meminta jika kedapatan, mafia

sembako agar langsung ditangkap. “Ya, kami minta kepada aparat penegak hukum supaya menangkap *pemain sembako*. Jangan sampai rakyat semakin menjerit demi keuntungan pribadi,” tegasnya.(kode 03)

Kutipan teks berita tersebut diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi, 2 Mei 2018 dengan judul “Polisi Diminta Tangkap “Pemain” sembako’. Dari judul berita, dapat segera diketahui bahwa selain terdapat *disfemisme*, jurnalis juga menggunakan *labelisasi* pada tulisannya. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *pemain* pada judul berita dan kalimat pada teks berita di atas “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau curiga ada permainan di tingkat distribusi sembako.”

Mengapa digunakan kata *pemain* pada teks berita tersebut. Jurnalis ingin menyampaikan kepada masyarakat Riau sebagai pembaca bahwa saat ini ada pihak yang mengambil untung menjual sembako dengan harga mahal . Hal tersebut diketahui saat rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi B DPRD Riau dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Provinsi, Bulog dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), diketahui tidak ada masalah dengan stok. Sekretaris Komisi B DPRD Riau Mansyur HS mencurigai pihak distribusi yang menjadi *Pemain Sembako* sebagai pelaku sosial.

selanjutnya Labelisasi juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Seperti diketahui, *aksi teror bom bunuh diri* di Surabaya dan Sidoarjo Ahad (13/5) dan Senin (14/5) lalu. Selanjutnya,*aksi teroris* kembali terjadi, Rabu (16/5). Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau diserang oleh *kawanan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai*.

Samsul menuturkan, kondisi tersebut turut mempengaruhi persepsi para investor yang berimbas pada kecemasannya mereka di dalam negeri. “Jadi semakin banyak gangguan keamanan yang terjadi, maka persepsi atas keamanan di negara kita semakin menurun. Persepsi itu mempengaruhi keputusan si investor,”ujarnya di Gedng BEI, Rabu(16/5).

Samsul menyampaikan, pemerintah tidak bisa hanya memberikan jaminan fundamental ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah harus meyakinkan soal keberlangsungan investasi dari para investor di Indonesia, terutama dalam kondisi genting saat ini.

Pasalnya, secara fundamental ekonomi, Indonesia masih kuat. Namun, bukan tidak mungkin jika fundamental ekonomi dapat terimbas kondisi keamanan yang terguncang.”Ini yang sebenarnya kita jaga, supaya investor tidak merasa bahwa investasi mereka di Indonesia bisa terhambat,”imbuhnya.

Pihaknya berharap agar kerjasama dari pihak pemerintah dan keamanan dapat segera mengatasi kondisi ini. Sebab, tidak bisa dipungkiri, keamanan yang goyah turut melemahkan sisi perekonomian. “Investor sebenarnya sudah cukup imun dengan kondisi ini, tapi kan harapan kita ini bisa diatasi secepatnya oleh pihak keamanan agar lebih aman dan investor nyaman untuk investasi,”ujarnya.(kode 13)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 17 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme* juga terdapat marjinalisasi Labelisasi. Pada kutipan teks berita dengan judul “Investor Mulai Cemaskan Keamanan” yang menjadi pelaku sosial adalah Investor yang mulai mencemaskan keamanan di Indonesia dengan adanya aksi teror bom bunuh diri di Sidoarjo dan aksi teroris di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau yang diserang oleh kawan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai.

Aksi teror bom bunuh diri dan teroris isi berita dalam paragraf pertama memberikan julukan aksi *teror bom bunuh diri* kepada masyarakat yang merupakan sebuah aksi yang dilakukan sekawanan kelompok yang menciptakan ketakutan dikalangan masyarakat. Seperti yang terlintas dipikiran masyarakat bahwasannya aksi *kawanan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai* itu terkesan kondisi saat itu sangat tegang sehingga pembaca sangat beranggapan tidak akan ada lagi para investasi yang akan berinvestor dengan nyaman di Indonesia, jika pembacanya adalah salah satu pengusaha yang menjalankan suatu bisnis usaha yang memang memerlukan investor pasti akan berpikir ulang dalam menjalankan bisnisnya tersebut, jangankan untuk menjalankan, untuk memulai saja mungkin ragu.

selanjutnya Labelisasi juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Bengkalis (RP)- Terkait ditangkapnya terduga teroris oleh densus 88 Anti Teror di kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Bupati Bengkalis Amril Mukminin meminta masyarakat daerah ini, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru. “Belum lama ini, densus 88 menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai *teroris*. (kode 20)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 31 Mei 2018 dengan judul berita “Teroris,Waspada Pendatang Baru” terdapat marjinalisasi Labelisasi. Pada kata *teroris* termasuk kedalam pemberian julukan kepada sekelompok pelaku kejahatan yang membuat takut warga-warga. Padahal kata yang dimaksudkan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin hanya sebagai bentuk agar warga atau masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Kapal agar

berhati-hati kepada pendatang baru. Tetapi bukan berarti semua pendatang baru itu adalah teroris.

2.2.4 Analisis Marjinalisasi Stereotipe

Berdasarkan pada kode data 02, 03, 05, 09, 15, 19, 20. Terdapat marjinalisasi jenis Stereotipe. Stereotip adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (tetapi umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan (Eriyanto, 2008:126). Selanjutnya, stereotip merupakan praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif. Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

PEKANBARU (RP)- Anggota Komisi B DPRD Riau Sugianto mengaku geram dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V alasannya, masih ada buruh harian lepas (BHL) digaji Rp 31 ribu per hari. Hal itu menurutnya sangat *tidak manusiawi*. Serta bertentangan dengan aturan yang ada. Masalah itu diketahui setelah Sugianto datang ke Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Di mana daerah tersebut merupakan areal pekerja PTPN V. “saya sudah kesana. Kamarin saya reses ke Lubuk Dalam. Bertemu BHL dan pegawai PTPN V,” ujar Sugianto, Selasa (1/5) siang.

Lebih lanjut dikatakan dia, dari aduan buruh, pihak perusahaan mengaku diupah Rp 80ribu ketika tim sertifikat *indonesian sustainable palm oil* (ISPO) datang. “*anehnya lagi, saat memberikan upah ke buruh, pihak perusahaan tidak memberikan kwitansi. Ini saya heran ada permainan apa di sana,*” ungkapnya. (kode 02)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi 2 Mei 2018 dengan judul berita “Dewan Segera Panggil PTPN V” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah PT Perkebunan

Nusantara (PTPN) V. Stereotip tampak digunakan pada frasa yang dicetak tebal . Melalui frasa tersebut, Anggota Komisi B DPRD Riau Sugianto mendeskripsikan mengenai gaji buruh harian lepas (BHL) yang digaji Rp 31 ribu per harinya, hal itu menurutnya sangat *tidak manusiawi* serta bertentangan dengan aturan yang ada. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari Sugianto yang telah datang ke lokasi dan bertemu dengan BHL dan pegawai PTPN V. Keterangan yang diperoleh ketika Sugianto bertemu dan mendengarkan aduan dari BHL bahwasannya pihak perusahaan mengaku dengan tim sertifikat *indonesian sustainable palm oil* (ISPO) mereka digaji Rp 80 ribu, sementara kenyataan dilapangan mereka hanya digaji Rp 31 ribu per harinya dan ia juga mengungkapkan pada saat memberikan upah ke buruh pihak perusahaan tidak memberikan kwitansi.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

PEKANBARU(RP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau *curiga ada permainan* di tingkat distribusi sembako. Pasalnya, sejumlah instansi yang telah dimintai keterangan stok pangan di Provinsi Riau aman.

Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni *kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi*. Ia meminta jika kedapatan, mafia sembako agar langsung ditangkap. “Ya, kami minta kepada aparat penegak hukum supaya menangkap pemain sembako. Jangan sampai rakyat semakin menjerit demi keuntungan pribadi,” tegasnya.(kode 03)

Kutipan teks berita tersebut diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi, 2 Mei 2018 dengan judul “Polisi Diminta Tangkap “Pemain” sembako’. Dari judul berita, dapat segera diketahui bahwa selain terdapat *disfemisme*, labelisasi jurnalis juga menggunakan *stereotipe* pada tulisannya. Hal tersebut

terlihat pada penggunaan kata *pemain* pada judul berita dan kalimat pada teks berita di atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau *curiga ada permainan* di tingkat distribusi sembako. yang adanya mengindikasikan pandangan negatif kepada pihak distribusi sembako. Kesannya ada penyeludupan dan penimbunan sembako oleh sejumlah instansi yang ingin mengambil untung.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. *Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar. (kode 05)*

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 5 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*, *difemisme*, juga terdapat marjinalisasi kateori Stereotipe. Pada kutipan teks berita dengan judul “Waspada Setnov Ajukan PK” yang menjadi pelaku sosial adalah Setya Novianto selaku tersangka korupsi yang akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai hukum melawan putusan hakim. Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Andreas Marbun Marbun menghimbau kepada masyarakat harus tetap mengawasi pergerakan dari seorang tersangka korupsi yakni Setnov karena saat ini kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang mengukum koruptor seperti sekarang ini.

Stereotipe tampak pada bagian yang dimiringkan karena adanya dugaan pelaku korupsi akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) untuk meringankan tuntutan sebelumnya yang diterimanya. Andreas memandang subjektif kepada Setnov karena diduga akan mengajukan PK.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Kepala Kepala Forensik RS Polri Kramajati Kombes Pol Edi Purnomo akhirnya membuka identitas pria yang didorong di kursi roda tersebut. edi membenarkan jika pria tersebut adalah Wawan Kurniawan alias Abu Afif. "Iya, masih diobservasi," ujarnya saat dihubungi melalui pesan *WhatsApp* kemarin.

Hanya sekitar 30 menit dia diperiksa di IGD. Selanjutnya, Abu Afif dirawat di kamar VIP RS Polri. "Luka di bahu kiri," ujar Edi. Namun, Edi enggan menjelaskan lebih lanjut penyebab luka yang diderita Abu Afif. *Abu Afif diduga sebagai pemicu dan provokator kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa lalu (8/5). Pemicunya adalah makanan yang dikirim oleh keluarganya tak kunjung diberikan petugas. Dia lalu memprovokasi napi lainnya untuk berontak, menjebol terali besi, dan menyerang petugas, wawan ditahan di Mako Brimob lantaran terlibat kasus terorisme. (kode 09)*

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi 11 Mei 2018 dengan judul berita "Pimpinan JAD Pekanbaru Terduga Provokator Kerusuhan" Pelakusosial yang dimarginalisasi pada teks berita tersebut adalah pemimpin Amir Jamaah An-Sharut Daulah (JAD) Pekanbaru Abu Afif yang diduga sebagai provokator kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua. Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak tebal. Melalui paragraf tersebut, Kepala Forensik RS Polri Kramajati Kombes Pol Edi Purnomo mendeskripsikan pemicu dari kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari edi yang membenarkan

bahwasannya Abu Afif sebagai pelaku provokator yang menyebabkan terjadinya kerusuhan setelah dihubungi melalui pesan *WhatsApp*.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial Fir (50) berwsama onum honorer bersinisial Azh (43) dipolisikan oleh Aswari yang juga sama-sama ASN di lingkungan Pemerintah Kaabupaten Indragiri Hulu (Inhu). *Pasalnya, oknum ASN bersama honorer tersebut diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza.*

Di mana laporan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut sudah diterima Satreskrim Polres Inhu pada Jumat (18/5) pekan kemarin. Dalam laporan tersebut ada oknum ASN berinisial Fir bertugas di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Inhu dan Ahz, oknum honorer di salah satu kantor camat sebagai terlapor.

Diakuirnya, laporan polisi dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Avanza ke Mapolres Inhu ini, adalah tindak lanjut laporan di Mapolsek Rengat Barat pada 4 November 2014.

Untuk penetapan tersangka dan dugaan keterlibatan orang lain sambungnya, harus dilakukan gelar perkara. Bahkan pihaknya, juga telah menjadwalkan gelar perkara pada pekan depan. *“Sepertinya laporan di Polsek Rengan Barat tidak sesuai dengan kejadiannya. Sehingga wajar saja ada laporan baru di Satreskim,” terangnya.*(kode 15)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 24 Mei 2018 dengan judul berita “Oknum ASN dan Honorer Dipolisikan”. Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah oknum ASN dan honorer. Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak miring. Melalui paragraf tersebut, Aswari yang juga sama-sama ASN di lingkungan Pemerintah Kaabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melaporkan ASN inisial Fir (50) dan honorer inisial Azh (43) yang *diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza..* Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan

pernyataan dari korban yang melaporkan kedua terduga tersangka tersebut dengan dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

BANGKINANG (RP)- Puluhan mahasiswa yang menyebut diri sebagai Mahasiswa Pemuda Kampar (Gempar), menggelar aksi unjuk rasa atau demo di halaman depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Senin (28/5). Para mahasiswa dan pemuda ini menuding adanya monopoli dalam pembagian proyek-proyek di Pemkab Kampar.

Koordinator aksi unjuk rasa Elangga menyebutkan, mereka curiga ada pengaturan dalam proses lelang proyek selama 2017 dan 2018. Hanya saja Elangga dalam orasinya juga tidak menyebut paket proyek mana yang dicurangi tersebut.

“Bahwa ada permainan dalam proses lelang itu sudah nyata. Namun belum ada tindakan dari penegak hukum. Tidak ada gunanya lagi mengikuti lelang, karena perusahaan pemenangnya sudah ada,” ungkapnya.

Sekda Kampar Yusri yang berhasil dihubungi wartawan sore kemarin menyebutkan, para pendemo itu bukan tidak ditemui pemkab. Tapi waktu aksi mereka terlalu singkat dan mereka juga menggelar demo berdekatan dengan waktu salat Zuhur. Hingga ketika adzan sudah mulai dekat, baik pendemo maupun Pemkab Kampar sudah sama-sama tidak ada waktu lagi.

Ketika ditanya terkait tuduhan monopoli proyek, Yusri tiidak yakin itu benar. Malah menurut Yusri, kalau mahasiswa yakin dan punya bukti, dirinya menyarankan agar pendemo menemui satker terkait langsung. “Bisa langsung ke satker saja kalau memang ada yang katanya seperti itu, itu saran saya” Terangnya. (kode 19)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 29 Mei 2018 dengan judul berita “Demo, Mahasiswa Tuding Ada Monopoli Proyek di Kampar”. Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah puluhan mahasiswa yang menyebut diri sebagai Mahasiswa Pemuda Kampar (Gempar). Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak miring.

Melalui paragraf tersebut, para mahasiswa melakukan demo terhadap Monopoli proyek yang ada di Kampar. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari Koordinator aksi unjuk rasa Elangga menyebutkan, mereka curiga ada pengaturan dalam proses lelang proyek selama 2017 dan 2018. Hanya saja Elangga dalam orasinya juga *tidak menyebut paket proyek mana yang dicurangi tersebut*. “Bahwa ada permainan dalam proses lelang itu sudah nyata. Namun belum ada tindakan dari penegak hukum. Tidak ada gunanya lagi mengikuti lelang, karena perusahaan pemenangnya sudah ada,”. Namun, Ketika ditanya terkait tuduhan monopoli proyek, Sekretaris Daerah Kampar Yusri tidak yakin itu benar. Malah menurut Yusri, kalau mahasiswa yakin dan punya bukti, dirinya menyarankan agar pendemo menemui satker terkait langsung. “Bisa langsung ke satker saja kalau memang ada yang katanya seperti itu, itu saran saya”.

selanjutnya Stereotype juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Bengkalis (RP)- Terkait ditangkapnya terduga teroris oleh densus 88 Anti Teror di kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, *Bupati Bengkalis Amril Mukminin meminta masyarakat daerah ini, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru. “Belum lama ini, densus 88 menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai teroris.*(kode 20)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 31 Mei 2018 dengan judul berita “Teroris,Waspada Pendatang Baru” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah seorang pendatang baru yang diduga sebagai Teroris. Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak tebal. Melalui paragraf tersebut Bupati Bengkalis mengingatkan kepada

masyarakat agar lebih waspada terhadap pendatang baru perihal densus 88 Anti Teror yang menangkap seseorang terduga teroris di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari Amril Mukminin yang meminta kepada masyarakat Bengkalis agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru karena Densus 88 belum lama ini menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai teroris.

2.3 Interpretasi Data

Berdasarkan deskripsi dan analisis data diatas, penulis memberikan interpretasi data tentang marjinalisasi dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos*. Ada empat indikator yang menjadi analisis dalam permasalahan ini yaitu: 1. *Eufemisme* (penghalusan makna), 2. *Disfemisme* (pengasaran bahasa), 3. *Labelisasi*, 4. *Stereotipe*;

Pertama, pada *Eufemisme* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat hanya lima data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *eufemisme*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* kurang menggunakan *eufemisme* dalam penulisan beritanya karena kurang memberitakan tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah.

Kedua, pada *Disfemisme* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang

berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat dua belas data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *disfemisme*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* banyak sekali menggunakan *disfemisme* dalam penulisan beritanya karena banyak memberitakan tindakan kelompok masyarakat bawah.

Ketiga, pada *labelisasi* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat hanya tiga data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *labelisasi*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* kurang menggunakan istilah ofensif kepada kelompok kelas atas kepada kelompok kelas bawah.

Keempat, pada *Stereotipe* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat tujuh data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *stereotipe*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* dikatakan cukup banyak menggunakan *stereotipe* dalam penulisan beritanya karena penilaian subyektif kepada orang, kelas, atau perangkat tindakan.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data di atas penelitian yang berjudul “Marjinalisasi dalam Berita pada Surat Kabar Harian *Riau Pos*” ini maka dapatlah ditarik kesimpulan yaitu:

- 1) Marjinalisasi jenis *Eufemisme* (penghalusan makna) terdapat lima data berita yang ditemukan pada surat kabar harian *Riau Pos*.
- 2) Marjinalisasi jenis *disfemisme* (bahasa pengasaran) terdapat dua belas data berita yang ditemukan dalam surat kabar harian *Riau Pos*.
- 3) Marjinalisasi *Labelisasi*, (pemberian label) terdapat tiga data berita yang ditemukan dalam surat kabar harian *Riau Pos*.
- 4) Marjinalisasi *Stereotipe* (penyamaan sebuah kata) terdapat delapan data berita yang ditemukan dalam surat kabar harian *Riau Pos*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua berita edisi 1-31 Mei yang ditemukan penulis hanya berjumlah dua puluh data dalam penelitian ini terdapat marjinalisasi dalam penulisannya baik itu jenis *eufemisme*, *disfemisme*, *labelisasi* dan *stereotipe*. Teori Eriyanto terbukti karena ternyata Wartawan sekaligus redaktur dalam mencetak berita dalam surat kabar harian *Riau Pos* menggunakan teknik marjinalisasi *eufemisme*, *disfemisme*, *labelisasi*, *stereotip*.

BAB IV HAMBATAN DAN SARAN

4.1 Hambatan

Hambatan yang dialami penulis selama penelitian ini yaitu:

- 1) sulitnya mencari penelitian yang relevan karena kajian ini baru dalam Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya program sarjana (S1)
- 2) sulitnya untuk mencari buku referensi;
- 3) sulitnya mengelompokkan data karena berita yang dicetak dalam surat kabar harian Riau Pos memiliki banyak rubrik ;
- 4) sulitnya mendeskripsikan data karena berbentuk tabel;
- 5) hambatan dalam menganalisis data karena yang dianalisis ada empat poin;
- 6) hambatan dalam membuat interpretasi data.

4.2 Saran

Ada beberapa saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya tentang penelitian yang berkaitan atau sama dengan penelitian penulis. Sarannya yaitu:

- 1) diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih mendalam lagi jika meneliti tentang Marjinalisasi dalam Berita pada Surat Kabar Harian *Riau Pos*;
- 2) penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar supaya hasil penelitian lebih akurat;

hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini juga bisa dijadikan rujukan untuk mendalami ilmu tentang Marjinalisasi dalam pembelajaran mata kuliah Wacana bagi jurusan Bahasa dalam berita pada jurusan Jurnalistik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningsih, Tri Setia. 2014. Menguak Proses Marjinalisasi di balik Kebijakan Normalisasi Sungai Gendol: Studi Kasus di Masyarakat Dusun Ngungan, Sleman Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Politik dan Pemerintah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Badara, Aris. 2012. Analisis Wacana: Teori, Metode dan Penerapannya Pada Wacana Media. Jakarta: Kencana
- Chaer, Abdul. 2010. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineke cipta.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendy, Onong Uchjana. 2005. *Teori Dan Praktik Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2008. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- _____. 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Fatmasari, Yuniar. "sekilas tentang detik.com & viva news.com" diakses tanggal 18 Maret 2018. (<https://yuniarfatmasari.wordpress.com/sekilas-tentang-detik-com/>).
- Hamidy, UU dan Edi Yusrianto. 2003. *Metodologi Penelitian disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*. Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Harahap, Nurseptia. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra (Online)*, Volume 8, No. 1, (<http://oaji.net/article>, diakses 19 Oktober 2017).
- Hendri,Ezi. 2010. Wacana Marjinalisasi Politik Perempuan Dalam Media (Studi Analisis Wacana Marjinalisasi Perempuan dalam Berita Calon Legislatif tahun 2009 di Harian Jawa Pos Periode 1 Maret - 30 April

2009). *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Panggabean, Wahyudi El. 2014. *Wartawan Berani Beretika*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.

_____. 2014. *Wartawan Berani Beretika*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.

Prantya, Shella Yan. 2017. Analisis Wacana Kritis Sara Mills Marjinalisasi Perempuan Dalam Berita Pelecehan Seksual Surat Kabar Harian *Memorandum* Edisi September 2013 Dan Juli 2015: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. Jurnal berjudul BAPALA, Vol. 1 No.1 2017 Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya.

Pratiwi, Anggia. 2014. "Misrepresentasi dalam Teks Berita dalam Surat Kabar Radar Sarko dan Merangin Ekspres: Analisis Wacana Kritis" diakses tanggal. 11 juni 2018. (https://www.academia.edu/19614537/Misrepresentasi_dalam_Teks_Berita_dalam_Surat_Kabar_Radar_Sarko_dan_Merangin_Ekspres_Analisis_Wacana_Kritis).

Romli, Asep Syamsul M. 2009. *Jurnalsistik Praktis Untuk Pemula*. Bandung: Rosda.

Razak, Abdul. 2008. *Metode Riset Perencanaan Dan Penulisan Laporan Penelitian Untuk Skripsi*. Pekanbaru: Unri Prees

_____. 2014. *Jurnalsistik Praktis Untuk Pemula*. Bandung: Rosda.

Setiowati, Endang. 2011. Marjinalisasi Perempuan Pertama Melalui Lagu: Suatu Analisis Wacana Kritis Terhadap Lagu "Jadikan Aku Yang Kedua". Jurnal berjudul HUMANIORA, Vol.2 No.2 Oktober 2011:1006-1024 Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Jurusan Marketing Communication Universitas BINUS.

Subarguna, Boy. S. 2008. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Dewan Pers. *Data Pers Nasional*. 2013. Jakarta: Dewan Pers.

Umar, Fatmah AR. 2017. Faktor dan Strategi Pencegahan Pematjinalan Bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo. Jurnal LITERA, Vol. 16, Nomor 1, April 2017 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.

Wareing, Shan & Linda Thomas. 2007. Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau